

**LARANGAN MENIKAHI PEREMPUAN YANG SESUKU DENGAN MANTAN
ISTRI MENURUT ADAT KEBUN TINGGI KECAMATAN KAMPAR KIRI
HULU KABUPATEN KAMPAR DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum Islam (S.sy)**



OLEH :

NETIHELNIWATI
NIM : 10821004132

**PROGRAM S.1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

KATA PENGANTAR

BIMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamua'laikum Wr.Wb

Al-hamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya skripsi yang berjudul, “LARANGAN MENIKAHI PERUMPUAN YANG SESUKU DENGAN MANTAN ISTRI MENURUT ADAT DESA KEBUN TINGGI KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM” dapat selesai seperti yang diharapkan. Selanjutnya shalawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu.

Dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta (Zulkifli dan Hidayati) beserta kakanda (Meldawati, Afridal, Yelni Mitrawati dan Ena Lidiawati, M. Abrar, Gustian) serta tak lupa pula kepada keluarga besar yang telah memberikan segenap motivasi baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja ilmiah ini dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah(S.Sy) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Nazir Karim selaku Rektor UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta pembantu Dekan I, II, III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menyandang prediket Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Drs. Yusran Sabili. M.Ag selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA selaku sekretaris jurusan yang dengan sabar melayani keluhan penulis mengenai masalah yang berhubungan dengan administrasi perkuliahan penulis.
5. Ibuk Dr. Hertina, M.Pd selaku pembimbing penulis “ terima kasih ibuk” itulah kata yang dapat disampaikan sebagai tanda terima kasih penulis pada beliau yang telah menyempatkan diri untuk membaca, memeriksa, dan memperbaiki penelitian ini, meskipun disela-sela kesibukannya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ibuk.
6. Ibuk Dra. Yusliati, MA selaku PA penulis serta bapak Prof. Dr. Sudirman selaku mantan PA penulis yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis
7. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kebun Tinggi tempat penulis mengadakan penelitian dan memperoleh informasi serta pihak yang terkait di dalamnya.

8. Pimpinan Perpustakaan baik pustaka Universitas maupun Fakultas yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan spirit intelektual kepada penulis selama menimba ilmu di kampus ini.
10. Kepada kakanda Habiburrahman S.P yang telah memberikan penulis motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh teman-teman dan pihak yang ikut mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penelitian yang lebih dalam untuk mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan dan kritikan dari berbagai pihak, terutama insan akademik. Akhirnya hanya kepada Allah SWT juga kita berserah diri dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Wassalam

Pekanbaru, 15 Maret 2013

Penulis

Neti Helniwati

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri di desa Kebun Tinggi. Tulisan ini diangkat karena adanya larangan masyarakat adat yang ada di Desa Kebun Tinggi untuk melaksanakan perkawinan bagi laki-laki dengan perempuan yang sesuku dengan mantan istrinya. Padahal ketentuan ini dalam nash, tidak ditemukan nash yang tegas melarang perkawinan dengan perempuan yang sesuku dengan mantan istri. Untuk itu perlu diteliti bagaimana ketentuan adat tentang larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri, alasan filosofis ketentuan adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri dan tinjauan hukum Islam terhadap adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri.

Penelitian ini bertempat di Desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui ketentuan adat melarang menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri, untuk mengetahui alasan filosofis ketentuan adat melarang menikahi perempuan sesuku dengan mantan istri dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri di desa Kebun Tinggi .

Adapun penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi di Desa Kebun Tinggi dari jumlah populasi 5 kasus (pasangan) dan 5 orang tokoh adat, dan 25 masyarakat dengan menggunakan teknik *total sampling*. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang mana data dikumpulkan melalui wawancara, angket dan observasi. Kemudian diolah melalui metode berfikir deduktif dan deskriptif analitik, sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang di teliti.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa memang benar adanya ketentuan adat untuk melarang menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri yang mana ketentuan adat tersebut berlaku dari dahulu sampai sekarang. Larangan di sini dimaksud bukan larangan secara mutlak yang haram dilanggar melainkan dijatuhkan sanksi duniawi apabila dilanggar. Selain

itu dapat juga diketahui alasan filosofis dilarang di antaranya untuk mendatangkan kemaslahatan, ketentraman hidup bermasyarakat, untuk menghindari terjadinya perpecahan dalam suku dan kekerabatan sesama anggota suku, sanksi sebagai pengobat hati mantan istri agar tidak merasa kecil dan sakit hati.

Kemudian apabila dilihat dari Hukum Islam larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri, tidaklah sejalan atau bertentangan dengan hukum Islam. Karena di dalam hukum Islam hukum larangan itu menimbulkan keharaman untuk menikah dan tidak ada mengandung setengah-setengah keharaman untuk melakukannya. Begitu juga apabila ditinjau dan dibandingkan dengan kemaslahatan yang diciptakan dan difikirkan Allah itu lebih utama, sempurna dan di atas segalanya dari pada kemaslahatan yang difikirkan dan diciptakan oleh manusia.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A.. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM DESA KEBUN TINGGI	
A. Geografi dan Demografi	14
1. Geografi.....	14
2. Demografi	16
3. Agama dan Pendidikan	18
B. Sosial Budaya dan Ekonomi	21
1. Sosial Budaya	21
2. Ekonomi.....	21
C. Adat Istiadat	22
BAB III LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Perkawinan	26
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	28
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	33
D. Larangan Perkawinan.....	38
1. Menurut Hukum Islam.....	38
2. Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.....	50
3. Menurut Hukum Adat.....	51
E. Hikmah Perkawinan	59
1. Menurut Hukum Islam.....	59
2. Menurut Hukum Adat.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Ketentuan Adat tentang Larangan Menikahi Perempuan yang Sesuku dengan Mantan Istri	63
B. Alasan Filosofis (falsafah) Ketentuan Adat tentang Larangan Menikahi Perempuan yang Sesuku dengan Mantan Istri...	74
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Larangan Menikahi Perempuan yang Sesuku dengan Mantan istri	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan proses awal ke arah pembentukan sebuah keluarga. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan satu sama lain, saling mencintai dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Dengan adanya perkawinan bisa menyatukan kedua belah pihak, dengan mudah mereka akan mengerti cara untuk saling membantu dan mereka dapat belajar saling menghargai satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan, dan kekurangan mereka¹.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu ikatan atau akad yang kuat atau *mitstaqan ghalizhon*. Ikatan perkawinan sebagai *mitstaqan ghalizhan* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita dan kekal berdasarkan syariat agama Allah². Ia merupakan tujuan yang sangat mulia yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah³.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30) : 21



¹ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), jilid 1, h. 207

² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), h. 5

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : CV Setia, 2000), Cet. ke- 1, h.13

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Swt untuk membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan, kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama keluarganya⁵.

يا م :
يا ه أ
يا ه و جاء
م يه

⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta :Kencana, 2006),Cet.ke-2, h.31

mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya puasa itu sebagai benteng baginya”⁶. (HR. Bukhari)

Dari hadist di atas dijelaskan bahwa diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan dan takut akan terjerumus ke dalam perzinahan. Dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa terpenuhi dengan pernikahan, jika takut terjerumus tapi belum mampu untuk memberi nafkah dianjurkan untuk berpuasa⁷.

Menurut bahasa nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal⁸.

Dalam Alquran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan⁹.

Hukum Islam telah mengatur secara tegas dan jelas mengenai masalah perkawinan baik itu hukum melaksanakan perkawinan, rukun dan syarat-syarat perkawinan, larangan dan bolehnya melakukan perkawinan, serta hikmah melaksanakan perkawinan dan lain-lain.

⁶ Al- Bukhari al Ja’fi al Mutawafi, *Shahih Bukhari*, (tt : Darl al Fikr, 1994), juz 6, h. 143

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009), Cet. ke-1, h. 455

⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet.ke-1, h.29

⁹ Abd. Rahman Ghazali, *op. cit.*, h.13

Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap¹⁰.

Selain dari rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan Islam juga telah mengatur larangan dari sebuah pernikahan, di antara larangan dari sebuah pernikahan adalah:

a. Larangan yang bersifat tetap

Mereka adalah perempuan yang sebab keharamannya memiliki sifat yang tidak akan mengalami perubahan. Sebab-sebab dilarangnya sebuah pernikahan selamanya terbagi ke dalam 3 kelompok yaitu larangan karena nasab, larangan karena perkawinan dan larangan karena persusuan¹¹.

b. Larangan yang bersifat sementara

Larangan sementara untuk menikah adalah larangan yang dapat dibatalkan dengan adanya perubahan keadaan. Larangan-larangan itu adalah larangan perzinaan, larangan jumlah, larangan pengumpulan (dua saudara perempuan), larangan kekufuran, larangan ihram dan larangan *iddah*¹²

Desa Kebun Tinggi merupakan salah satu desa yang terletak di kawasan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yang terdiri dari

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Putra Grafika, 2006), Cet. ke-1, h. 59

¹¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), Cet. ke-1, h.121

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Jilid. Ke-2, h. 77-91

tiga dusun, penduduknya terdiri dari berbagai suku namun 100% penduduknya beragama Islam.

Walaupun di desa ini penduduknya beragama Islam tetapi tidak tertutup kemungkinan yang melanggar aturan hukum Islam itu sendiri, serta adat dan kebiasaan masyarakatnya yang masih ada tidak sejalan dengan hukum Islam, seperti masalah warisan, pernikahan dan lain-lain.

Adat dan kebudayaan di desa ini masih terasa sangat kental, sampai sekarang aturan adat itu tetap dilestarikan dan tidak ada yang berubah sesuai dengan berkembangnya zaman. penduduk sangat menjaga aturan dari nenek moyang mereka terdahulu.

Adat Istiadat berarti peraturan tata cara hidup dan kehidupan atau yang disebut adat kebiasaan. Adat Istiadat ini juga bertujuan untuk merealisasikan kasih sayang terhadap sesama manusia dalam bermasyarakat¹³. Adat Istiadat terdiri dari dua kata yaitu “Adat” dan “Istiadat” berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”¹⁴.

Adat juga berarti suatu aturan norma yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat untuk ikut serta menjaga keseimbangan dalam hidup bermasyarakat¹⁵. Hukum rakyat itu tidak tertulis, kaidah-kaidah yang penting tidak tertulis, oleh karena kaidah-kaidah itu hidup dalam masyarakat

¹³ Amran Harahap, gelar bagindo raja Harahap, *Poda-Poda Ni Adat*, (Padang Sidimpunan : Pustaka Rahmat 1991), h. 1

¹⁴ Imam Syudiat, *Azaz-Azaz Hukum Islam*, (Yogyakarta : Library, 1995), h. 2

¹⁵ Sidi Ghazalba, *Masyarakat Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 133

dan dikenal oleh masyarakat, suatu sistem hukum penuh pepatah dan penuh kiasan¹⁶.

Di desa Kebun Tinggi berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis dapatkan dari beberapa tokoh adat dan masyarakat bahwa jika seorang laki-laki ingin menikahi perempuan, sedangkan laki-laki itu sudah pernah menikah sebelumnya. Apabila mantan istrinya (cerai hidup) mempunyai hubungan dengan perempuan yang akan dinikahinya, dalam hal ini hubungan sesuku, artinya antara perempuan yang ingin dinikahi tersebut sesuku dengan mantan istri dari laki-laki yang ingin menikah tadi, maka yang demikian termasuk perkawinan yang dilarang oleh adat, dilarang yang dimaksud di sini bukan dilarang secara mutlak artinya bisa menikah dengan syarat membayar sanksi¹⁷. Menurut ketentuan adat desa ini jika mereka ingin menikah maka pihak laki-laki harus membayar sanksi yang dijatuhkan negeri (kampung) kepadanya, sanksi yang harus dibayar pihak laki-laki itu adalah menyembelih satu ekor kambing untuk disembelih baik sebelum ataupun sesudah terlaksananya akad nikah¹⁸, sebab laki-laki tersebut sudah dianggap sebagai pemecah suku sebab dia telah menikahi dua orang perempuan yang sesuku yang dalam adat disebut dengan *tauni diboke* (menempati suatu tempat yang seharusnya tidak layak untuk ditempati oleh seseorang).

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. ke-3, h. 61

¹⁷ Zulkifli (Dt. Rajo Mangkuto), Tokok Adat, *Wawancara*, Kebun Tinggi, 13 April 2012

¹⁸ Rasyidin (Dt. Paduko), Tokok Adat, *Wawancara*, Kebun Tinggi, 13 April 2012

Untuk menentukan berlaku atau tidaknya ketentuan adat di atas tersebut maka penulis menemukan kasus-kasus tentang bentuk larangan pernikahan seperti ini, kasusnya adalah sebagai berikut:

1. Taslim suku Pitopang telah menikah dengan Melda suku Paduko (Melayu) pada tahun 2005, tapi sebelumnya Taslim sudah menikah dengan Anis yang juga suku Paduko (Melayu) dan telah bercerai. Taslim ini dijatukan sanksi oleh ninik mamak yaitu memotong satu ekor kambing.

Menurut keterangan dari beberapa ninik mamak dari suku Paduko (Melayu) dan pelaku sendiri mereka menikah dan melakukan pelanggaran larangan pernikahan karena saling mencintai satu sama lain dan juga mereka berdua juga sudah lama menduda dan menjanda yang ingin segera menikah walaupun pernikahan mereka adalah pernikahan yang terlarang oleh adat. Dan juga mereka mempertimbangkan kalau Anis tidak juga menetap dikampung karena setelah bercerai dari Taslim Anis merantau. Namun walaupun Anis tidak menetap di kampung Taslim tetap membayar sanksi yang sama yaitu menyembelih satu ekor kambing karena keluarga dari Anis masih menetap di kampung¹⁹.

2. Risman suku Paduko (Melayu) telah menikah dengan Erna suku Pitopang pada tahun 2011, tapi sebelumnya Risman sudah menikah dengan Iyul yang juga suku Pitopang dan telah bercerai. Risman ini dijatuhkan sanksi oleh ninik mamak yaitu menyembelih satu ekor kambing.

¹⁹ Rasyidin (Dt.Paduko),Hamidi (Dt. Marajo Kayo), Tokoh Adat, Taslim dan Melda, Pelaku Larangan Perkawinan, *Wawancara*, Kebun Tinggi, 14 April 2012

Menurut keterangan dari hasil wawancara ke beberapa pihak, penulis menyimpulkan bahwa Risman menikahi Erna dan melakukan pelanggaran larangan pernikahan juga karena alasan yang sama dengan kasus-kasus sebelumnya yaitu antara keduanya saling mencintai dan sering antara keduanya berkhawatir sehingga tidak bisa dilarang lagi oleh orang lain seperti orang tua dan keluarga mereka sendiri. Sehingga karena alasan itu mereka melakukan pelanggaran larangan pernikahan dengan syarat membayar sanksi yang ditetapkan adat.

Larangan perkawinan dalam hukum Islam mengenai masalah menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri tidak penulis temui, tetapi berbeda halnya dengan Desa Kebun Tinggi bahwa pernikahan seperti itu termasuk suatu larangan. Berdasarkan permasalahan di atas penulis ingin mengetahui alasan filosofis mengapa pernikahan seperti itu dilarang dan merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri menurut adat Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar ditinjau menurut Hukum Islam.**

B. Batasan Masalah

Supaya masalah ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka dari itu penulis membatasi pada larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri. Penelitian ini dilakukan di Desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas kepada perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri di desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
2. Bagaimana alasan filosofis ketentuan adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri di desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri di desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a) Untuk mengetahui ketentuan adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri di desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
 - b) Untuk mengetahui alasan filosofis ketentuan adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri di desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
 - c) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri di desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai syarat penyelesaian tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
- b) Dapat dijadikan pedoman bagi pihak yang berkepentingan apabila bermaksud melakukan penelitian dalam bidang yang sama.
- c) Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sendiri dalam menerapkan disiplin ilmu yang diterima di bangku kuliah.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), dengan mengambil lokasi di Desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yang lokasinya mudah dijangkau oleh penulis.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh adat , masyarakat desa Kebun Tinggi, pelaku pelanggar larangan perkawinan.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah kasus-kasus larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan kasus-kasus mengenai larangan pernikahan dengan perempuan yang sesuku

dengan mantan istri di desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dari tahun 2005 sampai sekarang yaitu sebanyak 5 kasus (pasangan) yang terdiri dari 10 orang, 5 orang tokoh adat dan 25 orang masyarakat.

b. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total sampling* karena semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel.

4. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu dari tokoh adat, pelaku pelanggaran larangan perkawinan dan para pihak yang dapat memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang ada yang berhubungan dengan penelitian, alim ulama, perangkat desa dan tokoh masyarakat.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu tokoh adat, pelaku larangan perkawinan, tokoh masyarakat, tokoh agama.
- b. Angket, yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi diadakan penelitian.

6. Metode Analisa Data

- a. Deduktif, yaitu dengan menguraikan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dengan cara yang khusus.
- b. Deskriptif analitik, yaitu dengan menguraikan data-data yang sudah diperoleh selanjutnya dianalisa secara teliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dan memberi gambaran yang jelas dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Tinjauan umum tentang lokasi penelitian yang terdiri dari Geografi, Demografi Desa Kebun Tinggi, Agama, Pendidikan. Sosial Budaya. Ekonomi, dan Adat Istiadat.
- Bab III : Tinjauan umum tentang nikah yaitu Pengertian Nikah, Dasar Hukum Nikah, Syarat-syarat dan Rukun Nikah, Larangan Pernikahan, dan Hikmah pernikahan.
- Bab IV : Pandangan hukum Islam terhadap adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri yang terdiri dari bagaimana ketentuan adat larangan menikahi perempuan sesuku

dengan mantan istri, bagaimana alasan filosofis ketentuan adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri dan tinjauan hukum Islam.

Bab V : Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA KEBUN TINGGI

A. Geografi dan Demografi

1. Geografi

Desa Kebun Tinggi adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yang menurut beberapa tokoh masyarakat setempat dikenal karena pada zaman dahulu beberapa orang masyarakat dari Kenagarian Pangkalan Kapas berkebun atau berladang di daerah hulu Sungai Batang Kapas yang lokasinya agak berbukit-bukit dan tinggi dari aliran sungai Batang Kapas tersebut, sehingga apabila air sungai pasang lokasi tersebut tidak banjir, dan dijadikanlah kebun atau ladang tersebut sebuah kampung yang dinamakan Kebun Tinggi, tapi karena perkembangan penduduk semakin banyak perkampungan tersebut dipindahkan keseberang sungai dari kampung sebelumnya yang memiliki dataran rendah yang memadai untuk membuat pemukiman yang lebih banyak, dan dekat dari aliran sungai Batang Kapas dengan nama tetap Kebun Tinggi sehingga apabila air sungai pasang wilayah tersebut langganan banjir tidak sesuai dengan namanya Desa Kebun Tinggi¹.

Desa Kebun Tinggi mulai terbentuk pada tahun 1977 merupakan gabungan beberapa kampung diantaranya: Kebun Tinggi, Selesung (Tanjung Permai) dan Lubuk Bigau yang ketiganya merupakan kampung

¹ Statistik Desa Kebun Tinggi tahun 2011/2012

yang ada di Kawasan Kenegerian Pangkalan Kapas, yang diresmikan oleh Bupati Kampar pada saat itu bapak R. Subrantas.S. dan pada tahun itu juga diadakan pemilihan Kepala Desa Kebun Tinggi yang pertama dan yang terpilih Bapak M.Sabar. Pada masa Pemerintahan Kepala Desa Pertama ini kegiatan Desa Kebun Tinggi banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat walaupun masih bersifat sangat sederhana, mulai dari pemilihan Kepala Dusun, membentuk Organisasi Kepemudaan Desa, Ninik Mamak, persukuan dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah dua periode masa pemerintahan bapak M.Sabar, masyarakat Desa Kebun tinggi. memilih pemimpin baru pada tahun yang bernama Nasrun, pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung yang diikuti oleh beberapa orang calon. Begitu selanjutnya dalam Pemilihan Kepala Desa hingga sekarang sudah lima Kepala Desa yang menjabat di Desa Kebun Tinggi². Pada saat sekarang desa Kebun Tinggi berdiri sendiri karena desa Lubuk Bigau dan Tanjung Permai sudah memisahkan diri membentuk masing-masing desa.

Luas wilayah Desa Kebun Tinggi adalah 3500 Ha yang terdiri dari 4 dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan Perkebunan.

Iklim Desa Kebun Tinggi, sebagaimana desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut

²Statistik Desa Kebun Tinggi tahun 2011/2012

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Desa Kebun Tinggi terletak di dalam wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangkalan Kapas dan Desa Tanjung Permai Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Bigau Kecamatan Kampar Kiri Hulu
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru- Lima Puluh Kota- Sumatera Barat.

2. Demografi

Demografi (keadaan penduduk) Desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan pada daftar pengisian data profil tahun 2011/2012 berjumlah 665 jiwa dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Menurut Jenis Kelamin

Mengenai keadaan penduduk menurut jenis kelamin akan terlihat pada tabel berikut :

TABEL II.1
PENDUDUK DESA KEBUN TINGGI
MENURUT JENIS KELAMIN

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Laki-laki	341	51,28%
2	Perempuan	324	48,72%
	Jumlah	665	100%

Sumber data : Statistik Desa Kebun Tinggi tahun 2011/2012

Dari tabel di atas diketahui bahwa 665 jiwa penduduk desa Kebun Tinggi jumlah jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan, yaitu jenis kelamin laki-laki 341(51,28%) jiwa sedangkan perempuan berjumlah 324(48,72%) jiwa.

b. Menurut Suku

Dari segi suku atau etnis, secara jelas jumlah penduduk desa Kebun Tinggi dapat diketahui dari tabel berikut :

TABEL II.2
PENDUDUK DESA KEBUN TINGGI
MENURUT SUKU

NO	NAMA SUKU	JUMLAH	PERSENTASE
1	Melayu	595	89,47%
2	Minang	52	7, 82%
3	Nias	18	2, 71%
	Jumlah	665	100%

Sumber data : Statistik Desa Kebun Tinggi 2011/2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perbandingan jumlah berdasarkan suku bangsa yang ada di Desa Kebun Tinggi menunjukkan suku Melayu menempati kelompok mayoritas sebagai suku asli, dengan jumlah 595(89,47%) jiwa dari jumlah penduduk, suku minang menempati urutan kedua dengan jumlah 52(7,82%) jiwa dari jumlah penduduk dan suku Nias menempati urutan yang paling sedikit dari persentase dengan jumlah 18(2,71%) jiwa dari jumlah penduduk.

c. Menurut Mata Pencaharian

Karena Desa Kebun Tinggi merupakan Desa pertanian dan perkebunan maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani pekebun, dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL II.3
KLASIFIKASI MATA PENCAHARIAN

NO	PERKERJAAN	JUMLAH
1	PETANI	126 KK
2	PEDAGANG	32 KK
3	PNS	14 KK

Sumber data : Statistik Desa Kebun Tinggi tahun 2011/2012

3. Agama dan Pendidikan

1. Agama

Ajaran agama sangat mewarnai kehidupan masyarakat desa Kebun Tinggi, sebagai mayoritas penduduk masyarakat desa Kebun

Tinggi memeluk agama Islam. Untuk mengetahui jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL II.4
PENGANUT AGAMA DESA KEBUN TINGGI

NO	AGAMA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Islam	665	100%
2	Kristen Khatolik	-	0 %
3	Kristen Protestan	-	0 %
	Jumlah	665	100%

Sumber data : Statistik Desa Kebun Tinggi tahun 2011/2012

Oleh karena 100% penduduk desa Kebun Tinggi memeluk agama Islam, maka sarana peribadatan yang ada di desa ini hanyalah sarana ibadah bagi umat Islam saja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL II.5
JUMLAH SARANA IBADAH

NO	RUMAH IBADAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Masjid	1	Baik
2	Musholla	2	Baik
	Jumlah	3	-

Sumber data : Statistik Desa Kebun Tinggi tahun 2011/2012

2. Pendidikan

Di Desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu pendidikan masih jauh terbelakang bila dibandingkan dengan daerah

lain, baik menyangkut dengan sarana pendidikan maupun tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

TABEL II.6
TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT	JUMLAH
1	PRA SEKOLAH	185 orang
2	SD	225 orang
3	SLTP	127 orang
4	SLTA	94 orang
5	PT	34 orang

Sumber data : Statistik Desa Kebun Tinggi tahun 2011/2012

Perkembangan pendidikan di Desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu dikatakan masih mempunyai standar yang masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, atau disebabkan kurangnya sarana pendidikan dan juga faktor ekonomi sebagaimana telah disebutkan pada tabel di atas.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Kebun Tinggi dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL II.7
SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	MDA	1 buah
2	SD	1 buah
3	SLTP	1 buah

Sumber data : Statistik Desa Kebun Tinggi tahun 2011/2012

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Kebun Tinggi masih sangat membutuhkan penambahan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan pendidikan desa ini.

B. Sosial Budaya dan Ekonomi

1. Sosial Budaya

Penduduk Desa Kebun Tinggi umumnya adalah suku tempatan asli , hanya beberapa jiwa saja yang berasal dari suku Minang dan Nias Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang kental sudah dilakukan oleh masyarakat sejak sebelum terbentuknya Desa Kebun Tinggi dan hal tersebut secara efektif dapat berjalan hingga sekarang.

2. Ekonomi

Sebagai daerah pertanian, anggota masyarakat desa Kebun Tinggi sangat tergantung kepada hasil budidaya dan pemanfaatan tanah. Menurut catatan terakhir 90 % penduduk daerah ini tergantung sumber penghidupannya dari usaha pertanian dan perkebunan, serta usaha-usaha jasa yang berkaitan dengan kegiatan pertanian dan pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan.

Kondisi ekonomi masyarakat desa Kebun Tinggi secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti perkebunan karet dan gambir, pedagang

dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS Pemda, honorer, guru, dll.

C. Adat Istiadat

Adat istiadat terdiri dari dua kata yaitu “Adat” dan “Istiadat” berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”³. Dalam buku *Masyarakat Islam* karangan Sidi Gazalba dikemukakan bahwa adat adalah suatu aturan norma yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat untuk ikut serta menjaga keseimbangan dalam hidup bermasyarakat⁴.

Dari pengertian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Adat Istiadat adalah susunan keadaan yang tingkah laku yang tidak tertulis dengan kebiasaan yang terpakai dalam pergaulan hidup turun-temurun yang berdasarkan para budi, moral, etika, dan norma-norma itu akan dikenakan sanksi-sanksi, dengan demikian masyarakat terpanggil untuk melestarikan adat.

Adat adalah satu konsep yang menjelaskan satu keseluruhan cara hidup Melayu di alam Melayu. Adat mengatur kehidupan mereka agar setiap anggota adat hidup beradat, seperti adat alam, hukum adat, adat beraja, adat bernagari, adat berkampung, adat memerintah, adat bercakap dan lain-lain. Adat berasal dari perilaku kebiasaan⁵.

³ Imam Syudiat, *Azaz-azaz Hukum Islam*, (Yogyakarta : Library, 1995), h.2

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 15

⁵ Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya, *Peranan Nilai-Nilai Adat Istiadat dalam Masyarakat Kampar*, (Bangkinang, tp, 2005), h. 17

Adat dibagi atas empat (*adat nan ampek*). Keempat macam adat tersebut menurut sifatnya terdiri atas dua jenis yaitu⁶ :

1. *Adat nan babuhua mati*, yang tidak boleh dirubah walau dengan mufakat sekalipun yaitu :

- a. *Adat nan sabana adat*, adalah aturan-aturan dan sifat-sifat serta ketentuan-ketentuan yang terletak pada setiap jenis benda alam ini. Segala yang diciptakan Allah Swt yang dapat kita lihat, raba, dengar dan rasakan adalah alam syariat.
- b. *Adat nan diadatkan*, adalah adat yang diadatkan oleh nenek moyang yang menciptakan adat itu dikenal secara turun temurun. Sifatnya tidak boleh diubah karena ketentuan yang disusun adalah alam takambang jadi guru. Perancang adat melayu atau *adat nan diadatkan* ini ada beberapa orang yang cukup menarik perhatian yaitu Datuk Demang Lebar daun dan Raja Sang Sapurba telah merancang asas kehidupan kerajaan yang berbunyi raja tidak menghina rakyat, rakyat tidak durhaka kepada raja. Inilah adat Melayu yang memberi dasar yang kokoh terhadap nilai demokrasi. Sebab telah memberikan kedudukan yang seimbang antara pihak pemerintah (raja) dengan pihak yang diperintah (rakyat). Datuk Kaya Leluhur Melayu Tua suku Laut telah membuat adat tentang pembagian hasil hutan dan laut⁷.

⁶ Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya, Kebudayaan Melayu Kabupaten Kampar, (Bangkinang : tp, 2005), h.14-16

⁷ UU. Hamidi, *Jagad Melayu dalam Lintasan Budaya di Riau*, (Pekanbaru: Bilik Kreatif Press, 2003), h. 78

2. *Adat nan babuhua sentak*, yang boleh dirubah melalui musyawarah, yaitu :

a. *Adat nan teradat*, adalah aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah mufakat penghulu-penghulu, ninik mamak ditiap-tiap nagari. Seperti ketentuan tentang perkawinan, dan lain-lain. Adat yang teradat lebih banyak merupakan aturan budi pekerti sehingga membuat penampilan manusia yang berbudi bahasa. Adat ini juga dapat dikesan dari aturan panggilan dalam keluarga, masyarakat dan kerajaan, seperti panggilan ayah,ibu, emak, abang,kakak, puan, encik, dan lain-lain⁸.

b. *Adat istiadat*, adalah aturan adat yang dibuat dengan kata mufakat ninik mamak dan penghulu-penghulu di nagari-nagari, seperti peraturan yang menampung segala keinginan dan kesukaan anak nagari selama menurut ukuran alu dan patut. Contohnya, olahraga, kesenian, dan lain-lain.

Ke empat jenis adat tersebut dihimpun dalam satu kata majemuk “adat istiadat “. Ke empat macam adat tersebut menyatu dalam penghayatan dan pengamalan masyarakat.

Di Minangkabau, adat terdiri dari empat macam⁹:

1. *Adat nan sabana adat*

Adalah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah, jadi yang telah merupakan undang-undang alam, yang selalu abadi

⁸ *Ibid*, h. 80

⁹ Chaerul Anwar, *Hukum Adat Indonesia (Meninjau Hukum Adat Minangkabau)*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta,tt), h.56-58

dan tidak berubah-berubah. Seperti murai berkicau, sapi melenguh, kerbau menguek.

2. *Adat nan diadatkan*

Adalah adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minangkabau yaitu Dt. Ketumanggungan beserta Datuk Perpatih Nan Sabatang. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tidak berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatah : *indak lakang dek paneh indak lapuak dek ujan*.

3. *Adat nan teradat*

Adalah adat yang terpakai yang berada di dalam sanagari-sanagari, saluhak-saluhak, salaras-salaras, yang merupakan aturan yang disesuaikan menurut keadaan dan tempat. Juga merupakan aturan-aturan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak zaman.

4. *Adat istiadat*

Adalah berkaitan dengan kata pepatah:

Dimano batang taguliang, disinan tindawan tubuh

Dimano tanah dipijak disitu langik dijunjung,

Kata-kata di atas mengibaratkan bagaimana seseorang harus menyesuaikan diri dengan adat setempat yang berbeda-beda, atau biasa juga dikiaskan sebagai berikut: *dimano air urang disauak, disinan adat urang diturut*.

Begitu juga di desa Kebun Tinggi tidak terlepas dari Adat Istiadat , setiap ada acara perayaan selalu dilandasi senang berkumpul,

musyawarah, mufakat dan gotong royong. Masyarakat desa Kebun Tinggi susunan masyarakatnya diambil dari garis keturunan ibu (*matrilineal*).

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam istilah fiqh disebut juga dengan *nikah*. Dalam Bahasa Indonesia istilah nikah dan kawin adalah identik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nikah adalah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi¹.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti kawin atau nikah. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar, nikah secara bahasa berarti berkumpul dan bersetubuh, dan beliau juga mengibaratkan pernikahan dengan pohon yang berhimpit². Pada dasarnya menurut beliau secara umum mengandung arti berkumpul (watha' dan akad)³.

Di dalam kitab *Subulu as-Salam* dikatakan bahwa nikah secara bahasa ialah merapatkan, menggenggam dan saling memasukkan serta bercampur. Kata nikah itu dalam pengertian bersetubuhan dan akad. Ada yang mengatakan nikah itu kata majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa nikah itu adalah pengertian hakikat bagi keduanya. Secara terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan tentang nikah, sekalipun berbeda, namun

¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), Cet. ke-5, h. 676

² Imam Taqiyuddin, *Kifayatu Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1986), h.268

³ *Ibid*

intinya mereka memiliki rumusan yang secara substansial sama. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama tersebut. Ulama golongan Hanafi mengartikan nikah dengan:

دي يد ملك الـ

“ Aqad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja⁴. Golongan Hanafiyah juga mengartikan nikah dengan watha' (hubungan suami istri).

Menurut golongan Malikiyyah , nikah diartikan dengan :

عقد على مجرد متعة التلذذ زيادة مية غير موجب قيه يبينه قبله
غير عالم قد حرمتها أن حررها الكتاب على المشهور والاجماع
على غير مشهور

“ Aqad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita, yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas. Serta tidak ada keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan oleh Al-qur'an atau oleh ijma'⁵.

Golongan Syafi'iyah mengartikan dengan :

يتضد أ أو تزويده نه

“ Aqad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata *ankaha* atau *tazwij* atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya”.

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Al-Mazahibi Al- Araba'ah*, (tt: Al-Maktabah Al-Tijariyah al-Kubra, 1969), juz 4, h.2

⁵ *Ibid.*

Imam Syafi’I mengartikan dengan akad yang diucapkan antara wali pihak perempuan dan qabul dari pihak laki-laki⁶.

Golongan Hanabilah mengartikan dengan ungkapan :

أ أوتزوي ديتض هـ

“ Aqad yang diucapkan dengan lafaz *ankaha* atau *tazwajz* untuk memperoleh manfaat bersenang-senang⁷.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum pernikahan telah disyariatkan dalam al-Quran, as-Sunnah, dan ijma ahli fiqih.

1. Alqur'an

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۚ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ۚ وَيَضَعُهَا إِذَا شَاءَ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ وَلَهُ الْمَلَأُ مَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ وَلَهُ الْمَلَأُ مَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ وَلَهُ الْمَلَأُ مَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁸.(QS. Ar-Rum (30): 21)

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Swt untuk membangun rumah tangga dalam rangka

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya : Duta Ilmu, 2004), h.641

Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dan beliau sangat menyukainya, beliau bersabda:

يا م
أ
م ي
يه ب
ل ا
أ ا ل
()

Dari hadist di atas dijelaskan bahwa diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan dan takut akan terjerumus ke dalam perzinahan. Dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-

¹⁰ Al- Bukhari al Ja'fi al-Mutawafi, *Shahih Bukhari*, (tt : Darl al Fikr, 1994), juz 6, h. 143

hal yang diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa terpenuhi dengan pernikahan, jika takut terjerumus tapi belum mampu untuk memberi nafkah dianjurkan untuk berpuasa¹¹.

3. Ijma' para Fiqh

Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum menikah, di antaranya:

1. Menikah sekali dalam seumur hidup. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Daud Azh-Zhahiri dan Ibnu Hazm. Pendapat ini mereka sandarkan pada *zhahir* perintah dari teks-teks syariat yang telah dikemukakan pada bahasan tentang anjuran untuk menikah, menurut mereka hukum asal dari perintah adalah wajib¹².
2. Hukum menikah adalah *mustahab* (sunnah). Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama dan jumbuh ulama empat madzhab. Menurut mereka perintah yang tertera pada teks-teks syariat yang menganjurkan untuk menikah adalah sunnah. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 3

...



 “Kawinilah wanita-wanita yang kamu senang¹³.(QS. An-Nisa (4):3

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009), Cet. ke-1, h. 455

¹² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, h.111

¹³Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*, (Semarang : PT.Karya Toha Putra, 2002), h.61

Menurut mereka, dalam ayat ini Allah mengaitkan antara perintah untuk menikah dengan kesenangan dirinya. Dengan demikian, siapa yang tidak senang untuk menikah, maka tidak mengapa dia tidak menikah¹⁴.

3. Hukum menikah berbeda-beda sesuai kondisi seseorang. Pendapat ini adalah pendapat yang paling populer dikalangan madzhab Maliki. Pendapat senada juga dikemukakan sebagian kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali. Mereka mengatakan,
 - a. Hukum menikah adalah wajib bagi seseorang yang sudah memiliki hasrat untuk menikah dan dia khawatir terjerumus dalam perzinaan jika tidak menikah. Oleh karenanya dia harus menjaga kesucian dirinya dan memelihara dirinya dari perbuatan yang haram dan jalan satu-satunya adalah dengan cara menikah¹⁵.
 - b. Hukum menikah adalah sunnah bagi orang yang memiliki dorongan seks, akan tetapi dia tidak khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Bagi orang yang demikian menikah lebih utama daripada ia sibuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lainnya¹⁶.
 - c. Hukum menikah adalah haram bagi orang yang tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, tidak adanya kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan pernikahan

¹⁴Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *loc.cit*

¹⁵*Ibid*, h. 112

¹⁶*Ibid*

tersebut¹⁷. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan dan penganiayaan¹⁸.

- d. Menikah adalah makruh bagi orang yang tidak dapat menafkahi istrinya dan dia tidak memiliki hasrat untuk menikah, akan tetapi dia tidak membahayakan istrinya¹⁹.

Penulis kitab *al-Mughni* mengatakan berkenaan dengan pernikahan ini, manusia terbagi menjadi tiga macam:

1. Orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran jika ia tidak menikah. Menurut ulama fukaha' secara keseluruhan, keadaan seperti itu menjadikan seorang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya. Dan jalannya adalah dengan cara menikah.
2. Orang yang disunnahkan untuk menikah. Yaitu orang yang sahwatnya bergejolak, yang dengan pernikahan tersebut dapat menyelamatkannya dari berbuat maksiat kepada Allah.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009). Cet. ke-1, h.45

¹⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *loc. cit.*

3. Orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah syawat atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang karena penyakit atau karena hal lainnya. Dan mengenai hal tersebut terdapat dua pendapat :
 - a. Ia tetap disunnahkan menikah, karena universalitas alasan yang telah dikemukakan di atas.
 - b. Tidak menikah adalah lebih baik baginya, karena ia tidak dapat mewujudkan tujuan menikah dan bahkan menghalangi istrinya untuk dapat menikah dengan laki-laki lain yang lebih memenuhi syarat. Dengan demikian berarti ia telah memenjarakan wanita tersebut. Pada sisi yang lain, ia telah menghadapkan dirinya pada ketidakmampuan memenuhi hak dan menunaikan kewajiban²⁰.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Di dalam kitab fiqih dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini adalah *conditio sine quanon* (merupakan syarat mutlak), absolut, tidak dapat dipungkiri, logis, dan rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin laki-laki dan perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan²¹. Adapun

²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. ke-1, h. 31-34

²¹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), edisi 2, Cet.ke-1, h. 51

syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut :

- a) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya.
- b) Keduanya sama-sama beragama Islam
- c) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan
- d) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.
- e) Keduanya telah mencapai usia yang telah layak untuk melangsungkan perkawinan²².

2. Wali Nikah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip²³.

Jumhur ulama mewajibkan wali dalam perkawinan, yang menguatkan pendapat ini adalah berdasarkan hadist

() ! :

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), edisi 1, Cet. ke-2, h. 64-66

²³ *Ibid*, h. 69

”Dari Abi Musa bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak boleh nikah tanpa wali”²⁴.(HR.Bukhari)

Sedangkan golongan Hanafiyah dan Syi’ah Imamiyah tidak mewajibkan adanya wali bagi perempuan dewasa dan sehat akal, menanggapi hadist di atas dengan menyatakan bahwa hadist tersebut menngandung dua arti: *Pertama*, tidak sempurna suatu perkawinan tanpa adanya wali, bukan berarti tidak sah. *Kedua*, bila kata tidak itu diartikan dengan tidak sah, maka arahnya adalah kepada perempuan yang masih kecil dan tidak sehat akalnya, karena terhadap kedua perempuan tersebut ulama Hanafiyah, seperti ulama jumhur, juga mewajibkan adanya wali²⁵.

Ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali buat perempuan untuk mengakadkan perkawinannya. Pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyhab wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali, namun menurut riwayat Ibnu Qasim, keberadaan wali hanyalah sunnah hukumnya dan tidak wajib²⁶.

²⁴Abi Al- Hasan Muhammad bin Abdul Hadi as-Sindi, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut : Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, 1998), h, 440

²⁵ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h.72-73

²⁶*Ibid*, h. 74

Syarat-syarat seorang wali adalah: Islam, laki-laki ini adalah syarat yang disepakati secara bulat (ijma'), berakal, baligh ini menjadi syarat bagi sebagian besar ulama, merdeka.

Imam Syafi'I dan Ahmad dalam suatu riwayat menambahkan satu syarat lagi, yaitu adil. Ia beralasan, jika seseorang tidak adil, maka ia dikhawatirkan akan memilih pasangan yang tidak sekufu' dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya²⁷.

3. Saksi

Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah tanpa ada kejelasan di dalam pernikahan itu sendiri. Pernikahan akan sah apabila dihadiri oleh para saksi ketika akad nikah dilangsungkan, meskipun kabar tentang pernikahan itu telah disampaikan melalui sarana yang lain²⁸.

Syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut :

- a) Berakal
- b) Baligh
- c) Islam
- d) Laki-laki
- e) Adil
- f) Saksi mendengar *ijab kabul* dan dapat memahami maksudnya²⁹.

²⁷ Abu Muhammad Kamal bin Asy-Syayyid Salim, *op.cit.*, h.224-225

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009), Cet. ke-1, h.525-526

²⁹ Abu Muhammad Kamal bin Asy-Syayyid Salim, *op.cit.*, h. 236

4. Sighat Akad Nikah

Yaitu *ijab qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Ijab adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh salah satu pihak (pihak pertama) untuk menyatakan keinginannya untuk membangun hubungan suami istri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak yang lain (pihak kedua) untuk menyatakan kerelaan dan persetujuannya atas apa yang diakadkan.

Syarat-syarat *ijab qabul* adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat atau ketentuan mengenai *sighat* (redaksi) akad
 - a. *Sighat*(redaksi) *ijab qabul* harus menggunakan kata-kata yang menunjukkan arti pernikahan.
 - b. *Sighat* harus menunjukkan pengertian selama-lamanya dan mantap.
 - c. Pernyataan menerima (*qabul*) harus selaras dengan pernyataan (*ijab*) dalam berbagai sisi.
 - d. Bersambungnya pernyataan *qabul* dengan pernyataan *ijab*.
 - e. Hendaknya pengijab tidak menarik kembali pernyataan *ijabnya* sebelum pihak pria menerimanya.
- 2) Syarat-syarat kualitatif yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak
 - a. Masing-masing pihak memiliki kapabilitas untuk menjalankannya akad atau dengan kata lain berakal baligh, dewasa.
 - b. Kedua belah pihak memiliki hak untuk melangsungkan akad.
 - c. Kedua belah pihak sama-sama ridho dan tidak ada unsur paksaan.

- d. Identitas masing-masing pihak jelas dan makruf (dikenal).
- e. Tidak ada faktor yang mengharamkan perkawinan antara kedua pasangan³⁰.

D. Larangan Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

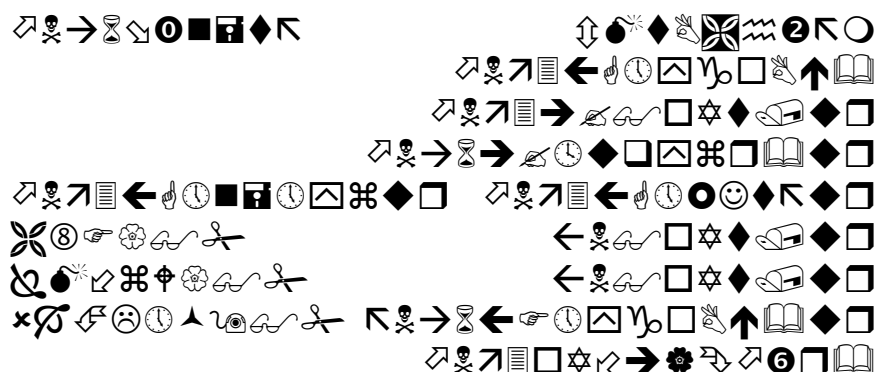
Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan.

Larangan perkawinan ada dua macam yaitu :

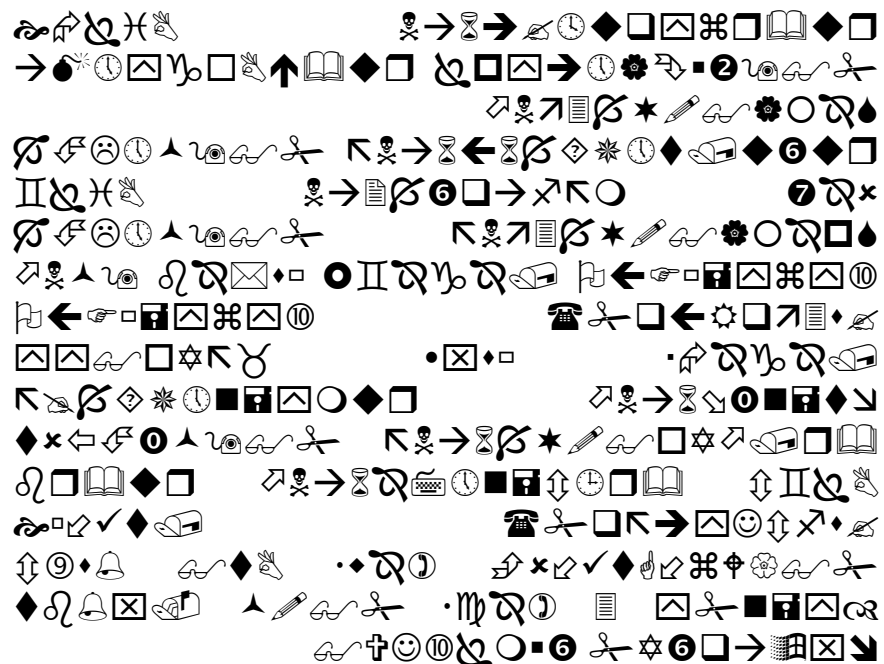
1. Larangan yang bersifat permanen

a) Larangan perkawinan karena nasab

Larangan perkawinan tersebut di atas berdasarkan QS. An-Nisa'(4): 23



³⁰ Abu Muhammad Kamal bin Asy-Syayyid Salim, *op.cit*, h.204-208



“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”³¹.(QS. An-Nisa’(4): 23)

Berdasarkan ayat-ayat di atas wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah:

- a) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.

³¹Departemen Agama RI, *op.cit.*,h. 64

- b) Anak-anak perempuan. Mereka adalah semua yang mempunyai hubungan nasab dengannya, seperti cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki dan yang perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara-saudara perempuan dari semua arah
- d) Bibi dari pihak ayah (*'ammah*). Mereka adalah saudara-saudara perempuan ayah dan seterusnya ke atas. Bibi dari pihak ibu (*khalah*), mereka adalah saudara saudara perempuan ibunya.
- e) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan (keponakan).
- b) Larangan perkawinan karena hubungan kekeluargaan melalui perkawinan (*mushaharah*)

Keharaman ini disebutkan juga dalam QS. An-Nisa (4):23 yang telah dicantumkan di atas, rinciannya adalah sebagai berikut:

- a) Ibu tiri, para ulama telah sepakat, bahwa wanita yang telah menjallin akad dengan ayah, haram dinikahi oleh anaknya, meskipun belum melakukan hubungan intim dengan ayahnya. Pengharaman ini bersifat permanen. Juga wanita yang telah terjalin akad nikah dengan anak haram dinikahi oleh ayah, meskipun anak belum mencampurnya.
- b) Mertua perempuan (ibu istri). Menurut jumhur ulama, seorang laki-laki haram menikahi mertua perempuannya setelah dia telah menjalin akad dengan putrinya.

c) *Rabibah* (anak perempuan istri). Pengharaman ini disyariatkan jika seorang laki-laki telah mencampuri ibunya. Kalau dia belum mencampuri ibunya, maka dia boleh menikahi anak perempuan istrinya.

d) Istri anak kandung. Seorang laki-laki tidak boleh mengawini istri anak kandungnya.

c) Larangan perkawinan karena persusuan

Larangan ini juga terdapat dalam QS. An-Nisa'(4): 23 di atas, dan dalam sebuah hadist:

يُحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرِمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخاري)

”Diharamkan karena ada ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab”³². (HR. Bukhari)

Rinciannya adalah sebagai berikut :

- a) Ibu yang menyusui dan ibunya (nenek), karena mereka masuk dalam kategori ibunya.
- b) Anak-anak perempuan dari ibu yang menyusui, baik yang lahir sebelum maupun sesudah dia menyusu kepada ibu mereka. Sebab, mereka adalah saudara perempuannya.
- c) Saudara perempuan dari ibu yang menyusuinya.
- d) Anak perempuan dari anak perempuan ibu yang menyusuinya.
- e) Ibu suami dari ibu yang menyusui

³²Imam Muhyi Ad Din An-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Beirut : Darl Marefah, 1996), jilid 9, h. 260

- f) Saudara perempuan suami dari ibu yang menyusuinya.
- g) Anak perempuan dari anak laki-laki ibu yang menyusuinya.
- h) Anak perempuan dari suami ibu yang menyusuinya, walaupun dari istri lain.
- i) Istri lain dari suami ibu yang menyusuinya.
- j) Istri dari anak yang menyusui haram bagi suami ibu yang menyusui.

2. Larangan bersifat sementara

1. Saudara perempuan istri (mengawini dua bersaudara secara langsung). Dasar keharamannya berdasarkan QS. An-Nisa' (4):23 di atas.

Menurut kesepakatan para ulama, seorang laki-laki tidak boleh menggabung (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara dalam masa yang sama. Akan tetapi, apabila istrinya meninggal dunia atau ia telah menceraikannya, maka dia boleh mengawini saudara perempuan istrinya.

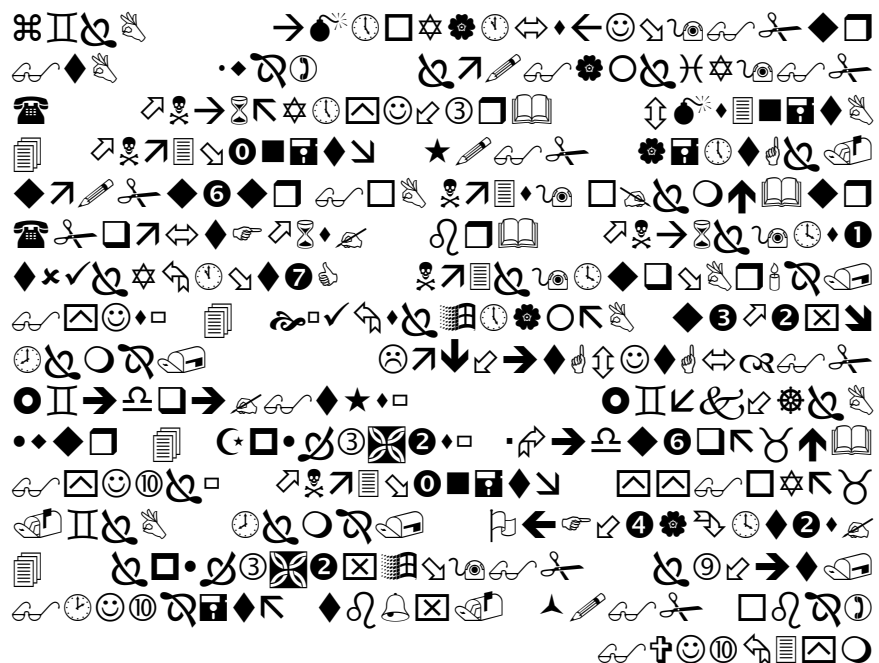
Bibi istri dari pihak ayah dan ibu (menggabung seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah dan ibu).

Para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki tidak boleh menghimpun dalam satu perkawinan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah dan pihak ibu, baik itu bibi sungguhan maupun bibi dalam arti *majaz* seperti saudara perempuan kakek dan seterusnya ke

atas, saudara perempuan nenek dari pihak ibu, ibu kandung nenek dari pihak ayah dan ibu dan seterusnya ke atas.

2. Wanita bersuami, wanita dalam masa 'iddah, dan istri orang kafir yang masuk agama Islam.

Dasar keharaman ini berdasarkan QS. An-Nisa' (4):24

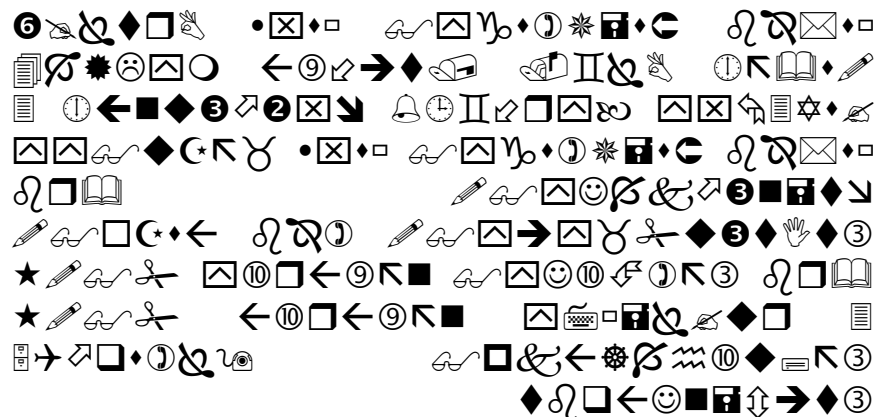


”Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”³³.(QS. An-Nisa' (4): 24)

³³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h.65

3. Wanita yang telah ditalak tiga kali, tidak halal bagi suaminya, kecuali dia telah menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu secara sah.

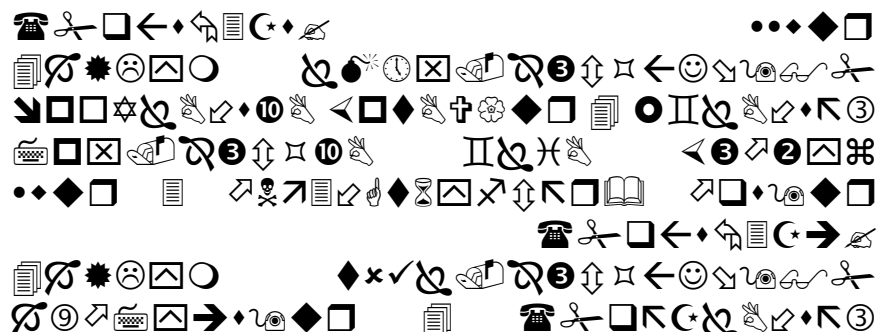
Dasar ini berdasarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 230



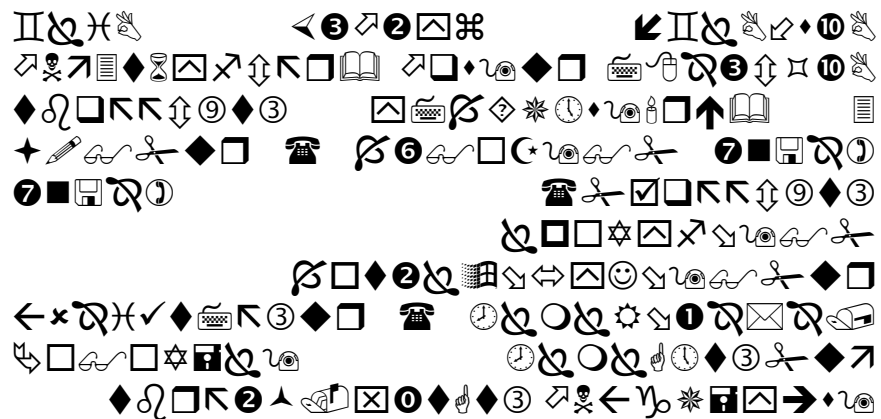
”Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”³⁴.(QS. Al-Baqarah (2): 230)

4. Wanita musyrik hingga masuk Islam

Dasar keharaman ini berdasarkan QS. Al-Baqarah (2) : 221



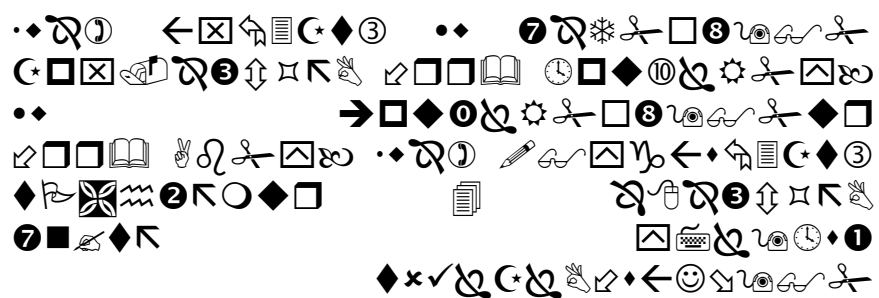
³⁴Ibid.,h. 28



“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”³⁵. (QS. Al-Baqarah (2) : 221)

5. Wanita pezina sampai ia tobat dan membersihkan rahimnya dengan sekali haid.

Dasar keharaman ini berdasarkan QS. An-Nuur (24):3



“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau

³⁵Ibid.,h. 27

laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”³⁶.(QS. An-Nuur (24):3)

Jumhur ulama selain Ahmad menafsirkan ayat ini sebagai celaan bukan pengharaman. Sedangkan Qatadah, Ishaq, Ibnu Ubaid, Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah tidak boleh mengawini wanita pezina kecuali dengan dua syarat yaitu tidak boleh mengawini wanita tersebut sampai ia tobat, dan membersihkan rahimnya dengan sekali haid³⁷.

6. Wanita yang berihram sampai dia bertahallul

Dasar keharaman ini berdasarkan sabda Rasulullah

ن نبيه بن وهب : أ عمر بن عبید الله أ أن يزوّ
شبية بن جبیر فأ إ أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال
أ رضي الله عنه يقول قال رسول الله ص م لا
ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب ()

“Dari Nubaih bin Wahab, bahwa Umar bin Ubaidillah ingin menikahkan Thalhah bin Umar dengan putrid Syaibah bin Jubair, lalu Umar bin Ubaidillah mengutus seorang kepada Aban bin Ustman agar dia menghadiri pernikahan tersebut –pada saat itu dia adalah Amirul haji – Aban berkata,”aku mendengar Ustman bin Affan RA berkata, Rasulullah bersabda, orang-orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh meminang”³⁸.(HR. Muslim)

7. Poligami di luar batas

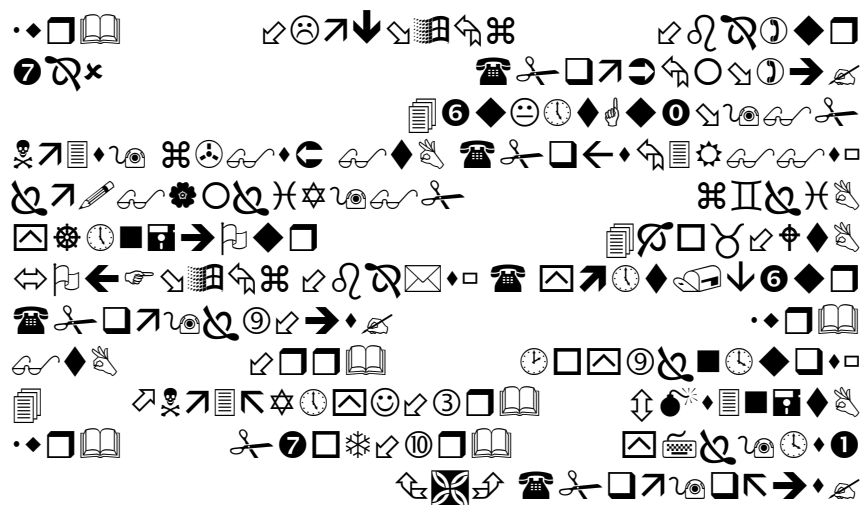
³⁶ *Ibid.*, h. 279

³⁷ Abu Muhammad Kamal bin Asy-Syayyid Salim, *op.cit.*, h. 140-142

³⁸ M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid 1, h.570

Seorang laki-laki diharamkan untuk menikah (memadu) lebih dari empat perempuan dalam satu waktu. Empat orang perempuan sudah dianggap lebih dari cukup bagi seorang laki-laki, sehingga menikah lebih banyak dari empat dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran atas kebajikan yang disyariatkan oleh Allah Swt.³⁹.

Firman Allah dalam QS. An-Nisaa (4):3



“Dan Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”⁴⁰.(QS. An-Nisaa (4):3)

Seorang muslim tidak boleh menghimpun lebih dari empat orang istri, kecuali kekhususan yang diberikan kepada Rasulullah Saw untuk

³⁹Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 605

⁴⁰Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 70-71

menikah lebih dari empat orang istri. Para ulam atelah sepakat mengenai hal ini⁴¹.

Selain dari adanya larangan perkawinan masih ada beberapa jenis perkawinan yang yang dilarang di antaranya adalah:

a. Nikah *Syighar*

Asy-Syighar secara bahasa berarti *ar-raf'u* (mengangkat), seperti *syaghara Al kalbu rijlahu li yabuula* (seekor kambing mengangkat kakinya untuk kencing)⁴².

Larangan nikah syighar berdasarkan hadist berikut

عن ابن عمر رضي الله عنه أ رسول الله ص م نهى
يزو جل ابنته على أن يزوجه لأخر ابنته ليس بينهما
()

“Dari Ibnu Umar RA, : Bahwa rasulullah Saw melarang nikah syighar, nikah syighar adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang lain, dengan syarat orang lain tersebut juga menikahkan putrinya dengan laki-laki itu, tanpa maskawin antara keduanya”⁴³. (HR. Bukhari)

⁴¹ Abu Muhammad Kamal bin Asy-Syayyid Salim, *op.cit.*, h.143

⁴² Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), jilid 5, h.325-326

⁴³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo : Darl al Fikr, 2004), jilid 1-3, h. 620

Para ulama sepakat menyatakan keharaman nikah *syighar*, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kebatalannya sebagai berikut:

- a) Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *syighar* sah dan mesti ada mahar *mitsl*-nya⁴⁴.
- b) Syafi'I dan Ahmad berpendapat bahwa nikah *syighar* tidak sah, karena larangan menuntut rusak dan batalnya akad. Dalam Al-Jami' disebutkan riwayat dari Imam Ahmad bahwa nikah semacam ini batal sekalipun dengan mahar⁴⁵.
- c) Sekelompok ulama lain Atha' bin Abi Ribah, Sufyan at-Tsauri berpendapat bahwa nikah ini boleh, dan bagi tiap-tiap pengantin wanita mendapatkan mahar *mitsl*⁴⁶.

b. Nikah *Muhallil*

Nikah *Muhallil* adalah nikah yang dimaksud untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali⁴⁷.

Berdasarkan hadist Rasulullah

عن علي رضي الله عنه أ
()
ل له

⁴⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al bassam, *op. cit.*, h. 327

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *op.cit.*, h. 148

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), Cet. ke-2, h. 531

“Diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib RA, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda. Allah SWT telah melaknat *muhallil* (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga supaya suaminya yang pertama dapat menikahi kembali) dan *muhallal lahu* (orang yang mentalak istrinya dengan talak tiga dan ingin menikahinya kembali)”⁴⁸.(HR. Abu Daud)

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa nikah *muhallil* itu batal baik ditinjau dari segi adanya larangan dan laknat bagi pelakunya, maupun dari segi adanya kesalahan dalam akad, yaitu menggunakan syarat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ditinjau dari segi nikahnya sendiri sebenarnya sah tetapi karena syarat yang terdapat dalam akad itu, maka yang batal hanyalah syaratnya saja dengan arti yang berlangsung adalah perkawinan biasa. Menurut Imam Syafi’I nikah *muhallil* dalam bentuk pertama dan kedua tidak sah, namun dalam bentuk ketiga ada ucapan Syafi’I yang mengatakan sah. Ulama Hanabilah berpendapat perkawinan tersebut tidak sah meskipun dalam akad tidak disebutkan syarat sama keadaannya dengan akad yang menggunakan syarat⁴⁹.

c. Nikah *Mut’ah*

Nikah *Mut’ah* disebut juga nikah sementara atau nikah terputus karena laki-laki menikahi seorang perempuan hanya untuk sehari atau setahun atau sebulan. Karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja⁵⁰.

⁴⁸ Halil Ahmad al-Saharanfuri, *Badl al-Majhud Fi Hail Abi Dawud*, (Libanon: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2007), juz 10, h. 44

⁴⁹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h.106-107

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 523

Berdasarkan hadist Rasulullah berikut:

أبي طالب رضي الله عنه أ رسول الله ص م نهى عن
أكل لحوم الحمرا لأهلية زمن خيبر ()

“Dari Ali bin Abu Thalib RA : Bahwa rasulullah SAW telah melarang menikahi wanita secara *mut’ah*, serta melarang makan daging himar jinak pada perang khaibar”⁵¹. (HR. Bukhari)

Dalam kitab *Syarh as-Sunnah*, Imam al-Baghawi mengatakan, para ulama sepakat mengharamkan nikah *mut’ah*. Kesepakatan merupakan ijma’ kaum muslimin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menyebutkan tentang adanya keringanan bagi orang yang terpaksa, seperti karena membujang yang cukup lama, dan setelah itu Ibnu Abbas menarik kembali pendapatnya tersebut setelah mendengar adanya larangan nikah *mut’ah*⁵².

2. Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur pula tentang larangan perkawinan. Hal ini dicantumkan dalam pasal 8, 9, dan 10 yang selengkapnya akan dikutip di bawah ini. Pasal 8 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan yang dilarang adalah.⁵³

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah maupun ke atas.

⁵¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *loc. cit.*

⁵² Syaih Hasan Ayyub, *op.cit.*, h. 149

⁵³ Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008), Cet. ke-8, h.11-12

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal ini seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9: Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

Pasal 10: Apabila suami dan isteri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan yang bersangkutan tidak menentukan lain.

3. Menurut Hukum Adat

Dalam tataran hukum adat, perkawinan merupakan hasil kebudayaan masyarakat itu sendiri yang disesuaikan dengan pola pikir, pandangan hidup dan

karakter masyarakat setempat. Dengan demikian perkawinan yang sarat dengan nilai-nilai perlu diatur proses dan tata caranya serta hal-hal yang dilarang dalam masyarakat untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan yang dilarang dalam masyarakat persukuan adat adalah perkawinan yang dinilai sumbang dan tidak sesuai dengan kultur budaya dan pemikiran masyarakat setempat dan menyalahi kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penulis akan menguraikan tentang larangan perkawinan dalam hukum adat di antaranya:

1. Pada Masyarakat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan *matrilineal*, memandang masalah perkawinan sebagai sesuatu peristiwa yang sangat penting artinya, karena perkawinan merupakan pelanjut garis keturunan dan perkawinan tidak hanya menyangkut kedua calon mempelai saja tetapi juga menyangkut orang tua dan seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Dalam melaksanakan suatu perkawinan, masyarakat Minangkabau tidak dapat hanya berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, melainkan juga perlu mempedomani hukum adat yang berlaku di daerah Minangkabau.

Di dalam perkawinan orang Minang selalu berusaha memenuhi semua syarat perkawinan yang lazim di Minangkabau. Menurut Fiony Sukmasari

dalam bukunya, syarat-syarat perkawinan adat Minangkabau adalah sebagai berikut :

- 1) Kedua calon mempelai harus beragama Islam.
- 2) Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain.
- 3) Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- 4) Calon suami (*marapulai*) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya. Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi semua syarat diatas dianggap perkawinan sumbang, atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat Minang⁵⁴.

Selain dari syarat-syarat di atas juga terdapat larangan perkawinan menurut adat Minangkabau, larangan tersebut tidak hanya semata-mata didasarkan atas putusan syara' yang menentukan halal haramnya nikah tetapi berdasarkan semata kepada perasaan, perikemanusiaan dalam masyarakat. Di antara larangan perkawinan dalam masyarakat Minangkabau adalah⁵⁵:

⁵⁴ <http://YisriAkbar.blogspot.com/2010/03/Hukum-Adat-Minang-Kabau.html>

⁵⁵ Gusri Basir, *Hukum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi: STAIN Bukitinggi Press, 2003), Cet. ke 1, h. 46.

- a. Tidak boleh memulangi janda dan salah seorang anggota keluarga yang sesuku, jika ia masih hidup.
- b. Dilarang mengawini seorang perempuan yang berfamili dengan bekas isteri, jika bekas isteri masih hidup. Lain halnya jika isteri tersebut meninggal dunia, ini disebut dengan *Mangganti Lapiak*.
- c. Dilarang seseorang kawin dengan orang yang sesuku, karena orang yang sesuku dianggap bersaudara. Suku Di Minangkabau pada dasarnya berdasarkan seketurunan sedarah. Orang seketurunan disebut *berdunsanak*. Kawin dunsanak akan melahirkan anak-anak yang tidak mungkin lagi dibedakan antara anak-anak dan kemenakan. Bila anak tidak lagi bisa dibedakan dengan kemenakan, maka akan menyulitkan pewarisan harta pusaka tinggi dan harta pencaharian⁵⁶.
- d. Dilarang mengawini perempuan yang berdekatan rumah dengan isteri maupun bekas isteri, kalau ia masih hidup, karena itu bisa mendatangkan sengketa yang tidak mau putus-putusnya, dan tidak membawa keamanan.
- e. Tidak boleh mengawini isteri bekas sahabat, kalau ia masih hidup.
- f. Tidak boleh mengawini bekas isteri mamak ataupun bekas isteri kemenakan.
- g. Tidak boleh melangkai dalam telangkai artinya mengawini seseorang perempuan yang masih dalam pinangan orang lain.

⁵⁶ Amir M.S, *Tanya Jawab Adat Minangkabau*, (Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, 2003), Cet. ke-3, h. 9

Sistem perkawinan Minangkabau disebut dengan *eksogami* yakni seseorang harus kawin dengan orang lain yang bukan anggota sukunya, karena mereka mempunyai anggapan orang yang satu suku merupakan saudara. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi, pihak-pihak yang melanggar harus mengundang pemuka-pemuka adat pada suatu jamuan dan mereka harus mengakui kesalahan dan meminta maaf⁵⁷.

Masyarakat Minangkabau melarang perkawinan dengan orang-orang tertentu seperti famili yang terdekat, dan ada yang melarang untuk melangsungkan perkawinan di dalam kliennya sendiri.⁵⁸ Dan ada juga yang mengatur melarang perkawinan di antaranya:

- 1) Dilarang kawin dalam lingkungannya sendiri.
- 2) Dilarang kawin timbal balik, maksudnya adalah seseorang yang melakukan perkawinan dengan isteri kemudian mengawini adik isteri, padahal isteri masih hidup.
- 3) Dilarang kawin dengan isteri yang sudah bercerai dan sesama warga klien, pada umumnya yang tidak boleh melangsungkan perkawinan adalah mereka yang masih tergolong kerabat dekat⁵⁹.

Menurut Drs. H. Muasri Rajo Mudo dalam Seminar Nasional Budaya Senat Mahasiswa Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Padang, mengatakan bila

⁵⁷Gusri Basir, *loc.cit.*,

⁵⁸R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Sumur Bandung, 1971), Cet. ke-7, h. 30.

⁵⁹Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 1981), Cet. ke-2, h. 111.

disesuaikan dengan ketentuan di atas, pengertian sesuku menurut garis keturunan ibu (*matrilineal*) maka perkawinan sasuku ada yang diharamkan dan ada pula yang dihalalkan.

Perkawinan sesuku yang diharamkan adalah :

- a. Saudara-saudaramu yang perempuan
- b. Saudara-saudara ibumu yang perempuan
- c. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.

Selain perkawinan sesuku yang diharamkan di atas, tentu halal mengawini perempuan sasuku lainnya. Larangan kawin sepersukuan dalam adat Minangkabau tidak dalam konteks halal dan haram. Kesepakatan untuk tidak kawin sepersukuan adalah soal raso jo pareso. Berdasarkan kekerabatan *matrilineal* masyarakat Minangkabau merasa badunsanak dengan orang-orang sekaum atau sepersukuan. *Tagak banagari paga nagari, tagak basuku paga suku*. Kawin sepersukuan dianggap kawin jo dunsanak. Pelanggaran terhadap aturan adat akan mendapat sanksi secara adat, karena itu mereka melarang kawin sesuku⁶⁰.

2. Pada masyarakat Melayu Kampar

Tidak banyak yang perlu diungkap di sini mengenai sahnya perkawinan, oleh karena kenyataan telah menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya telah meresapi sepenuhnya ketentuan agama yang dianut oleh masyarakat itu khususnya untuk fenomena sahnya perkawinan. Dengan

⁶⁰http://www.nusantaranews.net/2010/07/Kawin-Sapasukuan-dalam-Perspektif-Adat_1837.html

demikian masyarakat pada umumnya telah mengikuti ketentuan agama yang dianutnya. Bagi mereka yang menganut agama Islam, maka sahnya perkawinan adalah melalui cara akad nikah, yaitu *ijab kabul* yang dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan yang kemudian diikuti dengan kabul oleh bakal suami, dan dengan sekurang-kurangnya dua orang dewasa sebagai saksi. Bagi mereka yang beragama Kristen, maka sahnya perkawinan adalah melalui upacara pemberkatan yang dilakukan di Gereja⁶¹.

Kampar sangat identik dengan sebutan Kampar Limokoto dan dahulunya merupakan bagian dari kerajaan Minangkabau. Limokoto terdiri dari XIII Koto Kampar, Kuok, Bangkinang, Air Tiris dan Rumbio. Terdapat banyak persukuan yang masih dilestarikan hingga kini, termasuk model kekerabatan dari jalur ibu (*matrilineal*). Konsep adat dan tradisi persukuannya sama dengan konsep adat dan persukuan Minangkabau di Sumatera Barat khususnya di Luhak Limopuluah. Tidak heran bila adat istiadat hingga bahasa sehari-hari warga Limokoto sangat mirip dengan Minangkabau. Bahasa yang dipakai di Limokoto, yang juga kemudian menjadi bahasa Kampar adalah bahasa Ocu⁶².

Dalam masyarakat adat Limokoto misalnya perkawinan adalah perjanjian yang bersifat ikatan antara pria dengan seorang wanita yang hidup sebagai suami istri untuk melahirkan angkatan baru, dimana perjanjian

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008), edisi 1, h.231

⁶² <http://tempat-tutorial.blogspot.com/2010/05/sejarah-singkat-Kabupaten-Kampar.html>

tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga dengan dilangsungkannya perkawinan diharapkan akan semakin bertambah eratnya hubungan keluarga serta kekerabatan kedua belah pihak. Disamping itu perkawinan tidak dapat dilakukan hanya sebatas kesepakatan pria dengan wanita tanpa mengindahkan keluarga dan kerabatnya. Kriteria calon suami atau istri dalam masyarakat adat adalah seorang calon suami atau istri harus beragama Islam dan tidak boleh satu suku⁶³.

Setelah menjalani masa pertunangan baru dilangsungkan pernikahan dipihak wanita. Dalam akad pernikahan seorang pria didampingi oleh orang tua dan beberapa kerabat dekat. Pernikahan diadakan di rumah keluarga wanita yang telah dihadiri oleh para mamak *soko* maupun mamak *pisoko* pihak keluarga wanita. Suatu pernikahan dianggap sah apabila telah mengikuti persyaratan dan rukun-rukunnya.

Dalam adat Limokoto suami istri apabila mereka sudah *pulangan* atau *baolek* (perhelatan pernikahan) selama mereka belum *pulangan* atau *baolek* mereka tidak diperbolehkan dalam satu rumah⁶⁴.

a. Tata cara pernikahan

Pernikahan dilakukan di rumah wanita, adapun yang memandu akad nikah pernikahan adalah penghulu dalam adat limokoto yang disebut *khadi*, yaitu orang yang dipandang mengerti masalah agama dan telah diangkat oleh musyawarah kerapatan adat beserta wali negeri.

⁶³ Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Seni Budaya, *Kebudayaan Melayu Kabupaten Kampar* (Bangkinang : tt, 2005), h.24

⁶⁴ *Ibid*, h. 29-30

b. Mahar (mas kawin)

Mas kawin adalah syarat sahnya perkawinan dalam adat limokoto. Bentuk maskawin berdasarkan kesepakatan antara pria dan wanita, biasanya berupa cincin polos dan seperangkat alat sholat, maskawin disiapkan oleh pihak pria.

c. Saksi pernikahan

Saksi merupakan salah satu rukun perkawinan adat limokoto. Saksinya terdiri dari dua orang.

d. Wali nikah

Wali dalam pernikahan adat limokoto adalah diwajibkan dari pihak perempuan sama dengan syariat Islam.

e. Perwalian

Dalam pernikahan kalau tidak ada wali pihak perempuan maka pernikahan dapat dilanjutkan dengan perwalian yang resmi.

f. Waktu pelaksanaan akad nikah

Waktu disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jadi adat Limokoto Kampar tidak jauh beda dengan adat Minangkabau karena antara kedua adat ini sangat identik yaitu, di dalam adat Limokoto Kampar juga terdapat larangan melaksanakan perkawinan seperti halnya larangan perkawinan yang terdapat dalam adat Minangkabau di Sumatra Barat. Bentuk dari perkawinan yang dilarang tersebut yaitu perkawinan sesuku karena masyarakat Kampar menganut kekerabatan dari garis keturunan ibu (*matrilineal*) dan jenis perkawinan *eksogami*.

E. Hikmah Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Islam sangat menganjurkan dan mengembirakan pernikahan karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Di antara hikmah-hikmah yang terkandung dalam perkawinan adalah menurut Sayyid Sabiq:

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram perasaan tentang menikmati barang yang halal.
- b. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- c. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang,

- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Dengan perkawinan di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia⁶⁵.

2. Menurut hukum Adat

Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting, oleh karena itu :

- a. Bagi masyarakat yang merupakan kesatuan persekutuan hukum (genealogis), perkawinan itu merupakan sarana kelangsungan kehidupan masyarakat tersebut secara tertib dan teratur, yang akan membuahkan generasi baru sebagai penerus garis keturunan.
- b. Bagi masyarakat yang tidak terikat lagi dalam kesatuan persekutuan hukum genealogis, karena memisahkan diri dari keluarga-keluarga tersendiri, karena sebagai sebab, maka perkawinan tetap menjadi urusan

⁶⁵ Prof.Dr.Abdul rahman Ghazali, *op.cit.*, h.69-72

keluarga, yang juga akan melanjutkan generasi baru sebagai penerus keturunan dan kehidupan sosial orang tuanya (ataupun salah seorang dari orang tuanya)⁶⁶.

Dalam hal ini, Prof. Hazairin dalam buku “*de rejang*”, menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu bagaikan tiga buah rentetan perbuatan *magish* yang bertujuan untuk menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*) dan kesuburan (*vruchtbaarheid*)⁶⁷.

A. Van Gennep, ahli Sosiologi Prancis, menyatakan bahwa semua acara perkawinan itu merupakan *ritus de pasinge* (upacara-upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari kedua mempelai dari keadaan hidup berpisah dalam pribadi-pribadi sendiri, yang dengan upacara-upacara itu menjadi hidup bersatu dalam kehidupan bersama dalam rumah tangga yang berdiri sendiri⁶⁸.

Perkawinan mempunyai aneka hikmah oleh adat Minangkabau, di antaranya sebagai berikut :

- 1) Sebagai sarana legalisasi hubungan seksual antara pria dengan wanita dipandang dari sudut adat dan agama serta undang-undang negara.
- 2) Penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan atas suami istri dan anak-anak.

⁶⁶ Mhd. Kastulani, *Butir-butir Hukum Adat*, (Pekanbaru : tt, 1993), h.21

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

- 3) Memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup status sosial dan terutama untuk memperoleh ketentraman batin.
- 4) Memelihara kelangsungan hidup "*kekerabatan*" dan menghindari kepunahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Ketentuan Adat Larangan Menikahi Perempuan yang Sesuku dengan Mantan Istri di Desa Kebun Tinggi

Pada dasarnya mahram menurut Islam dan mahram menurut adat, terdapat banyak persamaan, yaitu sama-sama menyebabkan dilarangnya melangsungkan suatu perkawinan.

Menurut keterangan salah seorang pemuka adat, di dalam Islam sudah dijelaskan tentang macam-macam mahram. Selain mahram yang ditentukan oleh agama tersebut, maka di dalam adat masih terdapat tambahan lagi seperti larangan perkawinan sesuku dan larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri¹. Dan salah satunya yang telah penulis teliti yaitu larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri.

Desa Kebun Tinggi termasuk kepada daerah kawasan Kabupaten Kampar tepatnya di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, dan desa ini adalah salah satu dari empat desa yang disebut dengan Kenagarian Pangkalan Kapas yaitu desa Pangkalan Kapas, Lubuk Bigau, Tanjung Permai dan Desa Kebun Tinggi itu sendiri. Dan dari ke empat desa ini yang disebut Kenagarian Pangkalan Kapas mempunyai aturan adat yang sama antara satu dan yang lainnya. Tapi walaupun desa Kebun Tinggi ini termasuk kepada kawasan Kabupaten Kampar tidak semua adatnya sama dengan adat Melayu yang disebut dengan adat *limokoto* di daerah Kampar lainnya, melainkan adanya perbedaan, contohnya di dalam adat *limokoto*

¹ Muhammad Yusuf (Dt. Mangun), Tokoh Adat, Wawancara, Kebun Tinggi, 15 November 2012.

tidak ada larangan perkawinan seperti ini yang ada hanyalah larangan perkawinan sesuku. Sebagaimana penulis ketahui bahwa larangan perkawinan seperti ini hanya terdapat dalam adat desa Kebun Tinggi dan tiga desa lainnya yang disebut Kenagarian Pangkalan Kapas.

Dari hasil wawancara dengan tokoh adat penulis menemukan latar belakang munculnya adat desa Kebun Tinggi, sebagaimana diketahui desa Kebun Tinggi terletak antara perbatasan Sumbar - Riau, jadi sedikit banyak adat Sumbar berpengaruh kepada adat Kebun Tinggi, secara umum adat Kebun Tinggi berasal dari Sumbar istilahnya Kenagarian Pangkalan Kapas tidak bisa terlepas dari Kenagarian Sarilamak yang ada di Kabupaten 50 Kota, dulu Kenagarian Sarilamak Payung Sekaki, bunga setangkainya di Pangkalan Kapas. Apabila bunga setangkai layu maka Payung Sekakilah yang meneduhkan. Namun walaupun seperti itu tidak semua aturan adat desa Kebun Tinggi berasal dari Sumbar dan ada juga bagian-bagian tertentu yang berasal dari kesepakatan para nenek moyang terdahulu secara turun-temurun sampai sekarang dan salah satunya adalah adat larangan pernikahan dengan perempuan yang sesuku dengan mantan istri².

Seperti halnya adat Minangkabau di Sumatra Barat dan adat Limokoto di Kampar terdapat ketentuan adat tentang larangan perkawinan, di desa Kebun Tinggi juga memiliki ketentuan adat mengenai larangan pernikahan yaitu larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri, yaitu apabila seorang laki-laki sebelumnya pernah menikah kemudian bercerai, namun menikah lagi dengan

² Damris (Dt. Jindo), Tokoh Adat, *Wawancara*, Kebun Tinggi, 15 November 2012

perempuan lain yang sesuku dengan mantan istrinya dengan ketentuan mantan istrinya masih hidup, maka pernikahan seperti ini menurut ketentuan adat dilarang, dan ketentuan ini merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh ninik mamak dari dahulu secara turun-temurun atau yang disebut juga dengan istilah “*adat yang disokiahkan* (tidak bisa diungkai, dirobah, berlaku sampai sekarang)”. Artinya ketentuan adat ini tetap berlaku dan tidak bisa dirobah walaupun dengan berkembangnya zaman dan budaya. Dilarangnya calon suami menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istrinya disebabkan calon suami ini sudah dianggap sebagai pemecah suku antara calon istri dengan mantan istrinya karena calon istri dan mantan istri sepersukuan, yang dalam adat disebut *tauni diboke* (menempati suatu tempat yang seharusnya tidak layak untuk ditempati oleh seseorang). Calon suami dianggap sebagai pemecah suku karena yang pada awalnya dalam satu suku antara pihak satu dengan pihak lain tidak ada terjadi perpecahan dan merasa saling menyakiti, akhirnya menjadi terpecah hubungan dan kekerabatan sesuku karena calon suami melakukan pelanggaran adat yaitu menikahi perempuan lain yang sesuku dengan mantan istrinya³.

Larangan ini oleh karena garis keturunan di desa Kebun Tinggi ditentukan menurut garis ibu, maka suku serumpun disini dimaksudkan serumpun menurut garis ibu karena adanya ketentuan perkawinan yang bersifat *eksogami*, maka peranan asal usul ini terutama ketentuan tentang suku sangat penting sehingga hubungan sesuku bagi masyarakat desa Kebun Tinggi sangat dekat bisa disamakan sebagai hubungan saudara, menurut salah seorang tokoh adat orang-

³ Zulkifli (Dt. Rajo Mangkuto), Tokoh Adat, *Wawancara*, Kebun Tinggi, 16 November 2012

orang yang sesuku dinamakan badunsanak atau sakaum serta dianggap keluarga, dengan istilah adat “*saluluak sakandang, saitiok saayam*”⁴. Dari ungkapan adat di atas jelas dapat kita lihat sangat erat dan dekatnya hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam satu suku.

Maka dari itu jika pernikahan seperti ini dilakukan atau terjadi dalam masyarakat desa Kebun Tinggi termasuk kedalam pernikahan yang dilarang menurut adat, sebagaimana diketahui jika dalam suatu hukum Allah itu berisi suatu perintah kewajiban mengerjakan maka manusia wajib untuk mengerjakan perintah itu, apabila tidak dikerjakan manusia akan mendapat balasannya (dosa). Begitu juga dengan hukum Allah yang berisi perintah meninggalkan (larangan), apabila suatu larangan itu tetap dikerjakan oleh manusia maka manusia itu sendiri juga akan mendapat balasan (dosa), bentuk dari larangan yang ditetapkan Allah ini mengandung suatu kemutlakan untuk harus dipatuhi, jikapun dilanggar tidak akan merubah hukum itu walupun sanksinya tetap berlaku, dilarangnya menimbulkan suatu keharaman mengerjakannya dan mengandung sanksi ukhrawi. Begitu juga dengan aturan adat desa Kebun Tinggi tentang larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri yang berisi suatu perintah untuk meninggalkan (larangan) yang ditetapkan oleh manusia, tetapi berbedanya dengan yang ditetapkan Allah adalah jika hukum Allah berlaku secara mutlak, sedangkan hukum dilarang dalam adat bukan berarti dilarang secara mutlak untuk meninggalkan, dilarangnya pun bukan menyebabkan suatu keharaman apabila dilanggar melainkan jika ada yang melanggar aturan adat ini dikenakan sanksi

⁴ Hamidi (Dt. Marajo Kayo), Tokoh Adat, *Wawancara*, Kebun Tinggi, 17 November 2012

oleh adat dan sanksi itu bersifat duniawi bukan ukhrawi seperti hukum Allah.

Istilah adat mengatakan

hujan lai katoduah

kabuik lai nampak katoghang

salah ditimbang utang dibayar

Maksud istilah adat tersebut adalah jika ada yang melanggar aturan adat tersebut dianggap bersalah, kalau tidak mau dianggap bersalah terus menerus harus menebus kesalahan tersebut dengan membayar sanksi. Sanksinya sesuai dengan yang telah ditetapkan adat⁵.

Adapun sanksi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a) Memotong satu ekor kambing dijamu kerapatan adat kampung. Memotong kambing dilakukan di rumah tangga yang bersalah dengan menjamu minum makan, dipanggil ke tempat ia bersalah ninik mamak dalam kampung, dalam suku dan ninik mamak dalam nagari mana yang patut patut serta tua-tua cerdik pandai dengan mendoakan elok dipakai buruk dibuang dengan bermaaf-maaf. Pada mula munculnya adat ini tidak ditetapkan berapa umur dari kambing itu sendiri. Tapi sekarang para ninik mamak bermusyawarah menetapkan umur kambing minimal 2 tahun karena melihat banyak yang melakukan pelanggaran ketentuan adat tersebut.
- b) Dan jika pelanggar tidak mau membayar sanksi tetapi memaksa untuk tetap menikah, maka pernikahan mereka tidak diakui adat dan pernikahannya tidak bisa dilaksanakan secara adat. Mereka pun dikucilkan ditengah-tengah

⁵ M. Yusuf (Dt. Mangun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Kebun Tinggi, 15 November 2012

masyarakat, dan dianggap tidak beradat apapun acara adat mereka tidak diikuti sertakan di dalamnya seperti kenduri, menyelesaikan apabila terjadi persengketaan atau perkara lain. Dan bukan mereka saja yang tidak bisa diikuti sertakan beradat melainkan juga keluarga kedua belah pihak, tetapi keluarganya masih dianggap beradat. Dengan istilah adat mereka tidak bisa diajak

duduak saungguak

makan sadaun,

*dibuang sapanjang adat*⁶.

Maksud istilah adat di atas adalah mereka tidak akan dibawa seadat selembaga, duduk sama rendah tegak sama tinggi, dalam segala hal yang bersangkutan kepada adat istiadat dan lain-lain sebagainya. Begitulah cara mengeluarkan orang dari adat.

Adapun yang berhak menjatuhkan hukuman buang membuang atau mengeluarkan orang dari pada adat dalam sebuah negeri adalah kebulatan kerapatan penghulu-penghulu senegeri itu yang satu adatnya. Kebulatan penghulu penghulu senagari itu saja yang berhak menjatuhkan hukum buang membuang orang dari adat yang lain tidak.

Ketentuan seperti itu berlaku secara turun-temurun di dalam masyarakat adat desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dan sampai saat sekarang ini masih tetap berlaku dan dilestarikan oleh masyarakat Kebun Tinggi.

⁶Damris (Dt. Jindo), Tokoh Adat, *Wawancara*, Kebun Tinggi, 24 Oktober 2012.

Hukuman terhadap pelanggaran adat khususnya sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat desa Kebun Tinggi ini adalah bentuk hukuman yang lebih mengarah kepada perlindungan sosial. Bagi pasangan yang telah melanggar sistem perkawinan adat pada awalnya diberikan bimbingan serta penyuluhan oleh tokoh adat terhadap kesalahan yang telah dilakukannya beserta beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran tersebut. Jika masih tetap berkeinginan untuk melakukan perkawinan yang menurut adat tidak dapat dibenarkan, maka kepadanya dibebankan sejumlah sanksi yang telah disebutkan di atas yang berfungsi untuk menghapus kesalahan pelanggar pada adat.

Dampak yang timbul oleh ketentuan larangan pernikahan ini jika dilanggar tentu akan menimbulkan perselisihan antara masyarakat terutama antara sesuku dan juga keluarga dari pelaku pelanggarpun akan ikut dikucilkan dari adat jika pelaku pelanggar tidak membayar sanksi, tapi jika ketentuan ini ditaati dan diikuti oleh masyarakat adat dan tidak ada yang melanggar satu orangpun tentu ketentuan adat ini berdampak positif bagi ketentraman masyarakat pada umumnya sesuku khususnya.

Adapun sebagaimana diketahui di desa Kebun Tinggi terdapat lima suku yang terdiri dari 3 orang penghulu adat tiap-tiap suku (2 ninik mamak 1 panglimo), di antara kelima suku tersebut adalah :

- a. Suku Pitopang, terdiri dari :
 - Dt. Jindo : fungsinya besar ke nagari
 - Dt. Rajo Mangkuto : fungsinya besar dalam suku
 - Dt. Panglimo Rajo : fungsinya dubalang bagi ninik mamak

b. Suku Paduko (Melayu), terdiri dari :

- Dt. Paduko : fungsinya besar ke nagari
- Dt. Marajo Kayo : fungsinya besar dalam suku
- Dt. Panglimo Garang : fungsinya dubalang bagi ninik mamak

c. Suku pundulak (Piliang)

- Dt. Mangun : fungsinya besar ke nagari
- Dt. Paduko Kajelo : fungsinya besar dalam suku
- Dt. Panglimo Sutan : fungsinya dubalang bagi ninik mamak

d. Suku Puntongah (Melayu Tongah)

- Dt. Jalano : fungsinya besar ke nagari
- Dt. Bijo Lakmano : fungsinya besar dalam suku
- Dt. Panglimo Kojan Sutan : fungsinya dubalang bagi ninik mamak

e. Suku Punbalai (Bodi Caniago)

- Dt. Majo: fungsinya besar ke nagari
- Dt Laksamano : fungsinya besar dalam suku
- Dt. Panglimo Mudo : fungsinya dubalang bagi ninik mamak

Kasus-kasus Perkawinan dengan Perempuan yang Sesuku dengan Mantan Istri dan Sanksinya menurut Adat

Adat bertujuan untuk mengatur tata tertib kehidupan dalam masyarakat agar terciptanya masyarakat yang damai dan tentram. Setiap peraturan yang telah ditetapkan menghendaki pematuhan terhadap peraturan tersebut. Maka untuk menjaga eksistensinya, perlu ditetapkan suatu sanksi atau hukuman bagi siapa yang melanggarnya. Demikian juga halnya dengan pemberian sanksi bagi

pelanggar larangan perkawinan yang telah ditetapkan oleh adat. Sanksi ini diberikan bertujuan agar masyarakat tidak melakukannya.

Sanksi terhadap pelanggar larangan perkawinan di desa Kebun Tinggi sesuai dengan kesepakatan ninik mamak dalam musyawarah adat, adalah seperti yang telah diuraikan di atas yaitu memotong satu ekor kambing dan dijamu oleh semua pihak yang terlibat dan seluruh kerapatan adat kampung. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan kepada ninik mamak suku lain bahwa telah terjadinya pelanggaran larangan pernikahan dalam sukunya dan penutup rasa malu kaum kerabat yang bersangkutan.

Selain denda satu ekor kambing jika pelanggar larangan perkawinan tidak mau membayar denda tetapi memaksa untuk menikah maka mereka maupun keluarganya tidak diikut sertakan dalam beradat, apapun acara adat mereka tidak diikut sertakan sampai mereka benar-benar membayar dendanya atau dikucilkan dari masyarakat bahkan jika terlalu lama tidak membayar diusir dari kampung. Hal ini merupakan beban mental yang sangat berat dirasakan.

Namun demikian masih ada sebagian masyarakat yang melanggar aturan adat tersebut seperti dalam kasus-kasus dibawah ini :

1. Taslim suku Pitopang telah menikah dengan Melda suku Paduko (Melayu) pada tahun 2005, tapi sebelumnya Taslim sudah menikah dengan Anis yang juga suku Paduko (Melayu) dan telah bercerai. Taslim ini dijatuhkan sanksi oleh ninik mamak yaitu memotong satu ekor kambing.

Menurut keterangan dari beberapa Penghulu adat suku Paduko (Melayu), pelaku sendiri mereka menikah dan melakukan pelanggaran larangan

pernikahan karena saling mencintai satu sama lain dan juga mereka berdua juga sudah lama menduda dan menjanda yang ingin segera menikah walaupun pernikahan mereka adalah pernikahan yang terlarang oleh adat. Dan juga mereka mempertimbangkan kalau Anis tidak juga menetap di kampung karena setelah bercerai dari Taslim Anis merantau. Namun walaupun Anis tidak menetap di kampung Taslim tetap membayar sanksi yang sama yaitu memotong satu ekor kambing karena keluarga dari Anis masih menetap di kampung. Sanksi itu dibayar sebagai penebus kesalahannya pada adat⁷.

2. Epi suku Pitopang telah menikah dengan Umek suku Paduko (Melayu) pada tahun 2006, tapi sebelumnya Epi sudah menikah dengan Melda yang juga suku Paduko (Melayu) dan telah bercerai. Epi ini dijatuhkan sanksi oleh ninik mamak yaitu memotong satu ekor kambing.

Menurut keterangan dari Epi dan Umek sendiri sebagai pelaku pelanggaran perkawinan mereka menikah karena saling mencintai dan juga karena Umek sendiri sudah hamil sebelum terjadinya pernikahan. Sehingga mereka harus menikah demi menutupi malu keluarga walaupun pernikahan mereka dilarang adat. Penyelesaiannya mereka harus membayar sanksi yang telah ditetapkan. Akhirnya mereka pun membayar sanksi yang telah ditetapkan adat yaitu memotong satu ekor kambing yang disembelih sebelum pernikahan⁸.

⁷ Rasyidin (Dt.Paduko),Hamidi (Dt. Marajo Kayo), Tokoh Adat, Taslim dan Melda, Pelaku Larangan Perkawinan, *Wawancara*, Kebun Tinggi, 14 April 2012.

⁸ Epi dan Umek, Pelaku Larangan Perkawinan, *Wawancara*, Kebun Tinggi, 16 November 2012.

3. Epi suku Pitopang telah menikah dengan Depit suku Paduko (Melayu) pada tahun 2008, tapi sebelumnya Epi sudah menikah dengan Umek yang juga suku Paduko (Melayu) dan telah bercerai. Epi ini dijatuhkan sanksi oleh ninik mamak yaitu memotong satu ekor kambing.

Menurut keterangan Yulidar ibunya Epi dan Tete saudaranya Epi, serta pelaku sendiri, sebenarnya keluarga mereka tidak menyetujui Epi menikah dengan Depit karena Epi sudah pernah melakukan pelanggaran larangan pernikahan ini sebelumnya, sehingga kalau menikah lagi harus membayar sanksi yang sama untuk kedua kali dan juga karena alasan sesuku tadi antara Depit dengan Umek. Namun karena Epi dan Depit saling mencintai dan memaksa tetap ingin menikahi Depit walaupun harus dengan membayar sanksi yang telah ditetapkan. Melihat hal seperti daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya mereka menikah dan merekapun membayar sanksi dengan disembelihnya setelah akad nikah⁹.

4. Sial suku Punbalai (Bodi Caniago) telah menikah dengan Wita suku Pitopang pada tahun 2009, tapi sebelumnya Sial sudah menikah dengan Nina yang juga suku Pitopang dan telah bercerai. Sial ini dijatuhkan sanksi oleh ninik mamak yaitu memotong satu ekor kambing.

Menurut keterangan dari beberapa pihak yang didapatkan seperti tokoh adat, orang tua, masyarakat dan pelaku sendiri penulis menyimpulkan mereka menikah dengan alasan alasan yang sama dengan pelaku pelanggar larangan pernikahan lainnya yaitu karena saling mencintai. Walaupun dilarang mereka

⁹ Yulidar (Ibu) dan Tete (Saudara), Epi dan Depit, Pelaku Larangan Perkawinan, Wawancara, Kebun Tinggi, 16 November 2012.

tetap menikah jikapun harus menikah di desa lain dan bayar sanksi. Karena alasan seperti itu, ditakutkan terjadi dampak yang negatif, orang tua mereka akhir setuju dengan pernikahan itu. Pernikahan pun dilaksanakan dengan diwajibkan sanksi satu ekor kambing, yang disembelih setelah pernikahan terjadi.

5. Risman suku Paduko (Melayu) telah menikah dengan Erna suku Pitopang pada tahun 2011, tapi sebelumnya Risman sudah menikah dengan Iyul yang juga suku Pitopang dan telah bercerai. Risman ini djatuhkan sanksi oleh ninik mamak yaitu memotong satu ekor kambing.

Menurut keterangan dari hasil wawancara ke beberapa pihak, penulis menyimpulkan bahwa Risman menikahi Erna dan melakukan pelanggaran larangan pernikahan juga karena alasan yang sama dengan kasus-kasus sebelumnya yaitu antara keduanya saling mencintai dan sering antara keduanya berkhawatir sehingga tidak bisa dilarang lagi oleh orang lain seperti orang tua dan keluarga mereka sendiri. Sehingga karena alasan itu mereka melakukan pelanggaran larangan pernikahan dengan syarat membayar sanksi yang telah ditetapkan adat sebagai penebus kesalahan mereka pada adat.

B. Alasan Filosofis (falsafah) Ketentuan Adat Larangan Menikahi Perempuan yang Sesuku dengan Mantan Istri

Dalam wawancara penulis dengan beberapa orang tokoh adat (Ninik Mamak) desa Kebun Tinggi yaitu Zulkifli, Rasyidin, Muhammad Yusuf sesuai dengan adanya adat maka barang siapa yang melanggar ketentuan adat akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan adat.

Alasan filosofis atau hikmah adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri antara lain :

- a. Adat dibuat bertujuan untuk mendatangkan kemashlahatan, ketentraman dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Karena itu para pemuka adat membuat peraturan larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri. Karena mereka melihat bahwa antara sesuku itu adalah hubungannya sangat dekat seperti bersaudara. Oleh karena itu seandainya diperkenankan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri diantara anggota masyarakat, niscaya kemaslahatan dan ketentraman dalam masyarakat itu tidak akan terwujud. Sebab masing-masing anggota akan timbul rasa kecurigaan dan saling cemburu. Ha ini tidak mustahil akan timbul pertentangan dan permusuhan dalam sepersukuan. Oleh karena itu ketentuan tidak boleh menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri dapat menjalin ikatan keluarga yang kuat dan penuh kasih sayang, saling bantu membantu dan saling hormat menghormati, harga menghargai antar sesuku¹⁰.
- b. Pada dasarnya alasan dilarang dan pemberian sanksi oleh adat sebagaimana yang dimaksudkan nenek moyang dahulu adalah untuk menghindari terjadinya perpecahan dalam suku dan kekerabatan sesama anggota sesuku, menghindari perselisihan karena dahulunya masyarakatnya sangat sedikit hanya beberapa orang, sehingga menjadikan hubungan sesuku itu sudah dianggap seperti saudara. Maka dari itu dibuat aturan seperti itu dengan

¹⁰ Zulkifli (Dt. Rajo Mangkuto), Tokoh Adat, *Wawancara*, Kebun Tinggi, 16 November 2012

sanksi satu ekor kambing karena istilahnya satu ekor kambing pada waktu itu sangat berat dan tidak terbayar oleh para pelanggar larangan perkawinan sehingga tidak memungkinkan ada masyarakat yang melanggar¹¹.

- c. Dengan dilarangnya serta diberikan sanksi adat bagi pelanggar larangan perkawinan supaya mantan istrinya tidak merasa kecil hati atau merasa sakit hati karena mantan suaminya akan menikahi perempuan lain yang sesuku dengannya. Walaupun keduanya sudah bercerai tidak menutup kemungkinan masih ada rasa sayang dan ingin kembali lagi perempuan pertama dengan mantan suaminya, tetapi mantan suaminya sudah ingin menikahi perempuan lain yang sesuku dengannya. Sanksi itu dimaksudkan sebagai pengobat hati mantan istri dari calon suami yang akan menikahi perempuan yang sesuku dengannya, supaya tidak ada saling menyakiti antar sesuku. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa hubungan sesuku sudah dianggap sebagai hubungan saudara¹².
- d. Dengan dilarangnya serta diberikan sanksi bagi pelanggar larangan perkawinan, ini mengajarkan kepada calon suami agar berhati-hati dalam mencari istri untuknya. Sebab peraturan yang tidak ada hukuman atau sanksinya akan selalu dilanggar, walaupun diarang untuk melanggarnya¹³.
- e. Dengan dilarangnya dan pemberian sanksi memberikan peringatan atau pembelajaran kepada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran adat.

¹¹ M. Yusuf (Dt. Mangun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Kebun Tinggi, 15 November 2012

¹² M. Yusuf (Dt. Mangun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Kebun Tinggi, 15 November 2012

¹³ Rsyidin (Dt. Paduko), Tokoh Adat, *Wawancara*, Kebun Tinggi, 17 November 2012

Maka dalam hal ini dapat diambil hikmah, bahwa dengan adanya pemberian sanksi, maka bagi anggota masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan ia akan berhati-hati mencari calon istrinya¹⁴.

Dalam hal ini terlihat jelas alasan dilarangnya dan peranan pemberian sanksi bagi pelanggar larangan perkawinan, sehingga dengan dilarang dengan disertakan sanksi hubungan kekeluargaan dalam masyarakat khususnya dalam sepersukuan dapat terjalin dengan sebaik-baiknya.

Pada prinsipnya masyarakat desa Kebun Tinggi setuju dengan adanya ketentuan adat tentang larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri juga dengan alasan pemberian sanksi bagi pelanggar larangan perkawinan dan memahami filosofis yang terkandung di dalamnya, walaupun masih ada juga yang melakukan pelanggaran adat larangan perkawinan tersebut. Begitupun dengan tanggapan orang tua terhadap anaknya yang melakukan pelanggaran pada dasar dan awalnya orang tua tidak ada yang setuju anak mereka melakukan pelanggaran karena melanggar itu merupakan suatu kesalahan yang akan menimbulkan dampak bagi keluarga, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena anak mereka saling mencintai dan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Berikut adalah jawaban dan tanggapan dari masyarakat tentang adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri di desa Kebun Tinggi :

¹⁴Zainal, Masyarakat, *Wawancara*, Kebun Tinggi, 15 November 2012.

TABEL IV.1
**Jawaban Responden tentang Perkawinan Masih Dipengaruhi Unsur-
 unsur Tradisi**

Opsi	Masih dipengaruhi Unsur Tradisi	Frekuensi (F)	Persentase (P)
A	Ya, masih dipengaruhi	25	100%
B	Tidak dipengaruhi	0	0%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Olahan 2012

Dari tabel di atas dapatlah diketahui 25 (100%) responden menjawab bahwa pelaksanaan perkawinan masyarakat desa Kebun Tinggi masih dipengaruhi unsur-unsur tradisi.

Adapun adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri masih berlaku dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL IV.2
**Jawaban Responden tentang Berlakunya Adat Larangan Menikahi
 Perempuan Sesuku dengan Mantan Istri**

Opsi	Masih berlaku	Frekuensi (F)	Persentase (P)
A	Ya, masih berlaku	25	100%
B	Tidak berlaku	0	0%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Olahan 2012

Dari tabel di atas dapatlah diketahui 25 (100%) responden menjawab bahwa tradisi larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri masih berlaku sampai sekarang.

Adapun tanggapan masyarakat dengan adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL IV.3
Jawaban Responden tentang Tanggapan Masyarakat terhadap Adat Larangan Menikahi Perempuan Sesuku dengan Mantan Istri

Opsi	Tanggapan Masyarakat	Frekuensi (F)	Persentase (P)
A	Setuju	19	76%
B	Tidak Setuju	6	24%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Olahan 2012

Dari tabel di atas dapatlah diketahui 19 (76%) responden menjawab setuju dan 6 (24%) responden menjawab tidak setuju dengan adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri.

Adapun sanksi bagi masyarakat melanggar tradisi tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL IV.4
Jawaban responden tentang sanksi bagi pelanggar

Opsi	Sanksi bagi Pelanggar	Frekuensi (F)	Persentase (P)
A	memotong satu ekor kambing	25	100%
B	Dibuang dari kampung	0	0%
C	Tidak menghadiri perkawinan	0	0%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel di atas dapatlah diketahui 25 (100%) responden menjawab bahwa sanksi bagi pelanggar larangan perkawinan adalah memotong satu ekor kambing .

Adapun adanya masyarakat yang melanggar tradisi larangan perkawinan dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL IV.5
Jawaban Responden tentang Adanya Masyarakat yang Melanggar Tradisi Larangan Perkawinan

Opsi	Masyarakat yang Melanggar	Frekuensi (F)	Persentase (p)
A	Ada	20	80%
B	Tidak Ada	0	0%
C	Tidak Tahu	5	20%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel di atas dapatlah diketahui 20(80%) responden menjawab ada, dan 5 (20%) responden menjawab tidak tahu tentang adanya masyarakat yang melanggar tradisi larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri.

Adapun larangan pernikahan ini menyulitkan bagi masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL IV.6
Jawaban Responden tentang Larangan Pernikahan ini Menyulitkan Bagi Masyarakat

Opsi	Menyulitkan Bagi Masyarakat	Frekuensi (F)	Persentase (P)
A	Ya	7	28%
B	Tidak	18	72%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Olahan 2012

Adapun masyarakat berfikir untuk menghapus tradisi ini jika menyulitkan dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL IV.7
Jawaban Responden Berfikir untuk Menghapuskan Tradisi jika Menyulitkan

Opsi	Masyarakat Berfikir Menghapuskan Tradisi jika Menyulitkan	Frekuensi (F)	Persentase (P)
A	Pernah	3	12%
B	Tidak pernah	22	88%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Olahan 2012

Dari tabel di atas dapatlah diketahui 22 (88%) responden menjawab tidak pernah berfikir untuk menghapus tradisi tersebut dan 3 (12%) responden menjawab pernah berfikir untuk menghapus tradisi tersebut.

Adapun perbedaan pendapat antara sesama masyarakat dapat dilihat dari table berikut :

TABEL IV.8
Jawaban Responden tentang Adanya Perbedaan Pendapat antara Masyarakat

Opsi	Perbedaan Pendapat Masyarakat	Frekuensi (F)	Persentase (P)
A	Pernah	5	20%
B	Tidak pernah	5	20%
C	Tidak Tahu	15	60%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Olahan 2012

Dari tabel di atas dapatlah diketahui 15 (60%) responden menjawab tidak tahu, 5 (20%) responden menjawab tidak pernah, dan 5 (20%) responden menjawab pernah adanya perbedaan pendapat di antara masyarakat tentang tradisi larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri.

Adapun adanya dampak negatif bagi pelanggar tradisi dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL IV.9
Jawaban Responden tentang Dampak Negatif bagi Pelanggar

Opsi	Dampak Negatif bagi Pelanggar	Frekuensi (F)	Presentase (P)
A	Ada	0	0%
B	Tidak Ada	19	76%%
C	Tidak Tahu	6	24%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Olahan 2012

Dari tabel di atas dapatlah diketahui 19 (76%) responden menjawab tidak ada, 6 (24%) responden menjawab tidak tahu tentang adanya dampak negatif bagi

yang melanggar tradisi larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri .

Adapun adanya manfaat bagi masyarakat tradisi ini dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL IV.10
JAWaban responden tentang manfaat bagi masyarakat tradisi ini

Opsi	Manfaat bagi Masyarakat	Frekuensi (F)	Persentase (P)
A	Ada	18	72%
B	Tidak ada	2	8%
C	Tidak tahu	5	20%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Olahan 2012

Dari tabel di atas dapatlah diketahui 18 (72%) responden menjawab ada, 2 (8%) responden menjawab tidak ada, dan 5 (20%) responden menjawab tidak tahu tentang adanya manfaat bagi masyarakat tradisi larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri.

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Adat Larangan Menikahi Perempuan yang Sesuku dengan Mantan Istri

Di dalam kehidupan desa Kebun Tinggi sudah dibuat aturan-aturan yang menjadi peraturan atau norma adat yang harus diikuti oleh masyarakat, dan norma-norma yang dibentuk hukum yang tidak tertulis ini disebut “adat” atau dalam kajian ilmu Ushul Fiqh disebut dengan “*Urf*”.

Adat yang telah berkembang di desa Kebun Tinggi tersebut mengandung prinsip-prinsip yang berdasarkan pada pemikiran manusia yang telah berlangsung

turun-temurun dari generasi ke generasi. Suatu generasi yang mengikuti aturan adat tersebut karena menganggap aturan itu yang terbaik dalam mengatur kehidupan masyarakat dan telah dilakukan nenek moyang sebelumnya.

Secara etimologi *'urf* berarti yang baik¹⁵. Sedangkan secara terminologi *'urf* ialah suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan terus-menerus¹⁶.

Menurut Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti

أَلْعَه الْمَجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَ سَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أ

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan¹⁷.

Menurut Imam Malik *'urf* terbagi kepada 2 yaitu:

1. *'Urf* yang diakui dan ditetapkan tidak akan berubah dengan perubahan masa dan tempat. Yaitu *'urf* yang merupakan fitra manusia dan tabiat manusia. Seperti :makan, minum, tidur dan sebagainya.
2. *'Urf* yang dapat berubah dengan perubahan masa dan tempat¹⁸.

Pandangan Imam Malik di atas, menunjukkan bahwa *'urf* bukanlah sesuatu hal yang terdogma dan tidak dapat berubah seiring dengan perubahan zaman, tempat dan kebudayaan.

¹⁵ Nasrun Haroen, *ushul fiqh 1*, (Jakarta : PT.Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet.ke- 2, h.137

¹⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam)*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. ke-3, h. 141

¹⁷ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), Cet. ke-2, h.153

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Malik hayatahu wa 'asruhu arroddhu wa fiqhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 354

‘Urf terbagi kepada dua, yaitu:

1. *Al ‘urf al shahih* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.
2. *Al’urf al Fasid* adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib¹⁹.

Kehujjahan ‘urf al shahih ini, ditetapkan oleh ulama ushul fiqh dalam sebuah kaidah fiqhiyah, yaitu :

“adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum”²⁰

Di dalam agama Islam telah termuat aturan-aturan bagi kehidupan manusia dalam segala aspek. Aturan-aturan itu dalam beberapa aspek berbeda dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam norma adat. Dalam menghadapi prinsip yang berbeda tersebut, maka kita sebagai umat Islam adalah hukum yang fleksibel, maka dalam penerimaan suatu adat diadakan suatu penyeleksian.

Adapun yang dijadikan dasar dalam penyeleksian adat tersebut adalah unsur maslahat umum dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :

- a) Mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat
- b) Menghindarkan kemudharatan bagi kehidupan masyarakat

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. ke-6, h.134

²⁰ Jail Mubarak, *Kaidah Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), Cet. ke-1, h. 105

- c) Suatu yang dianggap baik oleh agama apabila di dalamnya terdapat unsur maslahat dan tidak ada padanya unsur mudharat. Demikian juga sebaliknya sesuatu tidak dianggap baik apabila di dalamnya terdapat unsur merusak atau mudharat²¹.

Unsur manfaat dan mudharat inilah yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penyeleksian suatu adat, artinya suatu yang biasa oleh masyarakat yang telah menyerap dalam kehidupan sehari-hari adalah baik apabila di dalamnya tidak terdapat unsur yang merusak. Karena suatu yang dianggap baik oleh umat secara menyeluruh adalah baik juga menurut pandangan Allah SWT, adat seperti inilah yang dapat dijadikan sumber hukum.

Demikian juga halnya dengan pemberian sanksi bagi pelanggar larangan perkawinan yang sudah berlaku atau melembaga dari generasi ke generasi di masyarakat desa Kebun Tinggi. Adat ini dijadikan aturan dengan dasar pertimbangan bahwa adat ini sangat berguna untuk menjaga ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan juga untuk menjaga hubungan persaudaraan.

Melihat kenyataan ini maka para pemuka adat terdahulu dan berlanjut sampai sekarang, mengambil inisiatif untuk menjaga hubungan ini dengan membuat aturan adat yaitu larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri dan memberikan sanksi bagi pelanggar aturan adat perkawinan tersebut. Karena adat ini sangat besar manfaatnya, yaitu untuk menjaga tali persaudaraan tetap kuat agar tidak terjadinya perpecahan dalam satu suku serta

²¹ Amir syarifuddin, *Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam dalam llingkungan Adat Minang Kabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984), h.164

terciptanya kemaslahatan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh sebab itulah para pemimpin adat membuat aturan larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri dan pemberian sanksi bagi pelanggarnya.

Karena ketentuan adat tersebut telah berlaku turun-temurun, dan telah dirasakan pula manfaatnya oleh masyarakat desa Kebun Tinggi, atau dalam kajian ushul fiqh dinamakan *Maslahah Mursalah*.

Adapun yang dimaksud *maslahah mursalah* adalah prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat)²².

Sesuai dengan salah satu qaedah fiqhyah yang berbunyi :

"Menolak mafsadat (kerusakan/ keburukan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan²³."

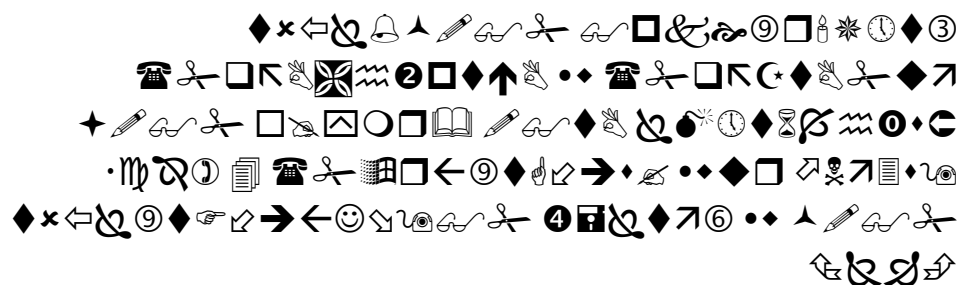
Namun walaupun bagi masyarakat adat desa Kebun Tinggi ketentuan adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri ini banyak mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi anggota sesuku khususnya, menurut penulis ketentuan adat ini jika ditinjau menurut hukum Islam tidaklah sejalan atau bertentangan dengan hukum Islam. Penulis beralasan karena di dalam hukum Islam hukum larangan itu menimbulkan keharaman untuk menikah dan tidak ada mengandung setengah-setengah keharaman untuk melakukannya. Begitu juga apabila ditinjau dan dibandingkan

²² Chaerul Uman, Dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1998), h. 135

²³ A.Djazululi, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2006), Cet. ke-2, h. 29

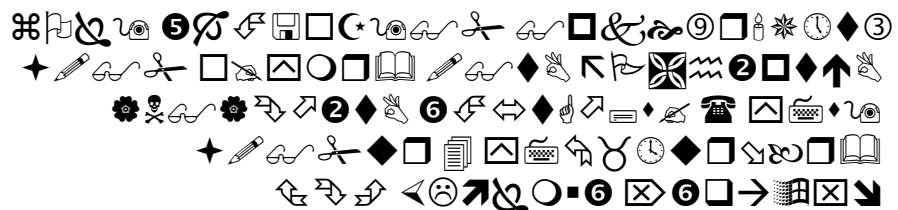
dengan kemaslahatan yang diciptakan dan difikirkan Allah itu lebih utama, sempurna dan di atas segalanya dari pada kemaslahatan yang difikirkan dan diciptakan oleh manusia. Serta kita sebagai orang yang beriman dilarang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah.

Hal ini berdasarkan pada firman Allah QS. Al-Maidah (5):87



“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”²⁴.(QS. Al-Maidah (5):87)

Juga dalam QS. At-Tahrim (66):1



²⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*, (Semarang : PT.Karya Toha Putra, 2002), h.111

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"²⁵.(QS. At-Tahrim (66):1)

Jadi, dari ayat di atas jelaslah bagi kita bahwa adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri di desa Kebun Tinggi tidak sejalan atau bertentangan dengan hukum Islam karena tidak sejalan dengan firman Allah di atas dan dengan pepatah "*adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah*".

²⁵ *Ibid.*,h. 507

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan skripsi ini begitu panjang lebar, maka dari itu penulis mengambil kesimpulan :

1. Ketentuan adat yang menonjol yang terdapat di desa Kebun Tinggi adalah adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri. Yang dimaksud disini adalah dilarangnya seorang laki- laki yang sebelumnya sudah pernah menikah dan bercerai, kemudian menikah dengan perempuan lain dan perempuan lain tersebut sesuku dengan mantan istrinya. Apabila dilakukan akan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Jika ada yang melanggar aturan adat ini maka akan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya, yaitu : memotong satu ekor kambing, jika pelanggar tidak mau membayar sanksi maka pelanggar akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat, dianggap tidak beradat dan tidak ikut sertakan dalam acara adat apapun baik itu pelanggar sendiri maupun keluarganya.
2. Alasan filosofis (hikmah) yang terkandung dalam adat larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri ini adalah : mencegah terjadinya permusuhan dan perpecahan dalam kelompok adat terutama dalam sesuku, mempertahankan adat yang telah berlaku sejak dulu, memberi peringatan dan pengajaran kepada para pemuda agar berhati-hati dalam mencari calon istri, mempererat tali persaudaraan dan kekerabatan

dalam sesukuan, pengobat hati bagi mantan istri agar tidak merasa kecil hati dan cemburu, seerta supaya terjadinya perdamaian dalam sesuku.

3. Ditinjau menurut hukum Islam, adat ini tidaklah sejalan atau bertentangan dengan hukum Islam. Karena di dalam hukum Islam hukum larangan itu menimbulkan keharaman untuk menikah dan tidak ada mengandung setengah-setengah keharaman untuk melakukannya. Begitu juga apabila ditinjau dan dibandingkan dengan kemaslahatan yang diciptakan dan difikirkan Allah itu lebih utama, sempurna dan di atas segalanya dari pada kemaslahatan yang difikirkan dan diciptakan oleh manusia.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya bagi kita semua. Adapun beberapa saran tersebut antara lain :

- a. Diharapkan bagi pemuda yang sudah bercerai jika ingin menikah lagi hendaklah ia mengetahui secara pasti apakah wanita tersebut sesuku dengan mantan istri atau tidak, agar tidak terjadi perkawinan yang telah dilarang oleh adat.
- b. Diharapkan kepada ninik mamak untuk dapat memberikan sanksi kepada orang yang telah melanggar ketentuan adat tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan juga lebih diperketat lagi agar tidak ada yang melanggar lagi dan nilai-nilainya dapat dilestarikan. Diharapkan juga kepada ninik mamak untuk mengajarkan pengetahuan adat dan

memberikan nasehat kepada anak kemenakannya, agar timbul rasa cinta dan mau menghargai kebudayaan sendiri.

- c. Kepada masyarakat hendaklah memilih–milih adat mana yang sejalan dengan hukum Islam, mematuhi aturan adat tersebut dan mana adat yang bertentangan dengan hukum Islam.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006)
- Al Mutawafi, Al- Bukhari al Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (tt : Darl al Fikr, 1994)
- Amir M.S, *Tanya Jawab Adat Minangkabau*, (Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, 2003)
- Al-Saharanfuri, Halil Ahmad, *Badl al-Majhud Fi Hail Abi Dawud*, (Libanon: Dar al- Kotob Al-Ilmiyah, 2007)
- Amran Harahap, gelar bagindo Raja Harahap, *Poda-Poda Ni Adat*, (Padang Sidimpuan : Pustaka Rahmat 1991)
- An-Nawawi, Imam Muhyi Ad din, *Shahih Muslim*, (Beirut : Darl Marefah, 1996)
- Anwar, Chaerul, *Hukum Adat Indonesia (Mengkaji Hukum Adat Minangkabau)*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta,tt)
- As-Sindi, Abi Al- Hasan Muhammad bin Abdul Hadi, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut : Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, 1998)
- As-Subki , Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010)
- Ayyub, Syaik Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad , ,Dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009)
- Basir, Gusri *Hukum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2003)
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, (Kairo : Darl al Fikr, 2004)
- Dijk, R. Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandunng : Sumur bandung, 1979)
- Djazululi, A, Prof. H. *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya, *Kebudayaan Melayu Kabupaten Kampar* (Bangkinang : tp, 2005)

- Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya, *Peranan Nilai-Nilai Adat Istiadat dalam Masyarakat Kampar*, (Bangkinang, tp, 2005)
- Doi , A. Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Effendi, Satria, M.Zein, Prof.Dr. H.M.A, *Ushul fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008)
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta :Kencana, 2006)
- Hakim, H. Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : CV Setia, 2000)
- Hamidi, UU., *Jagad Melayu dalam Lintasan Budaya di Riau*, (Pekanbaru: Bilik Kreatif Press,2003)
- Imam Syudiat, *Azaz-Azaz Hukum Islam*, (Yogyakarta : Library, 1995)
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : PT.Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Kastulani,Mhd.,*Butir-butir Hukum Adat*, (Pekanbaru : tt, 1993), h.21
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Mubarok,Jail,*Kaidah Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002)
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993)
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)
- Sabiq, Sayyid,*Fiqh Sunnah*, Terjemahan (Bandung : PT. Pena Pundi Aksara, 2009)
- Soekanto,Soerjono *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakaeta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Soekanto,Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008)
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Azas*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 1981)

Syarifuddin, Amir, Prof. Dr., *Hukum Perkawinan Islam* di Indonesia, (Jakarta : Putra Grafika, 2006)

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984)

Taqiyuddin, Imam, *Kifayatu Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1986)

Uman, Chaerul, Dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1998)

Usman, Muchlis, Drs. *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukuk Islam)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999)